


**Any Rahmayani,
Dana Listiana, Ina Mirawati**



**AKTIVITAS EKONOMI
ORANG-ORANG BUGIS
DI KESULTANAN PONTIANAK
PADA ABAD KE-19
HINGGA AKHIR MASA KOLONIAL**

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



AKTIVITAS EKONOMI ORANG-ORANG BUGIS DI KESULTANAN PONTIANAK PADA ABAD KE-19
HINGGA AKHIR MASA KOLONIAL

Penulis: Any Rahmayani, Dana Listiana, Ina Mirawati

Editor: Veni Putri

Tata Sampul: Wulan

Tata Isi: Ansara

Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Desember 2018

Penerbit

DIVA Press

(Anggota IKAPI)

Sampangan Gg. Perkutut No.325-B

Jl. Wonosari, Baturetno

Banguntapan Yogyakarta

Telp: (0274) 4353776, 081804374879

Fax: (0274) 4353776

E-mail: redaksi_divapress@yahoo.com

sekred.divapress@gmail.com

Blog: www.blogdivapress.com

Website: www.divapress-online.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rahmayani, Any, Dana Listiana, Ina Mirawati

AKTIVITAS EKONOMI ORANG-ORANG BUGIS DI KESULTANAN PONTIANAK PADA ABAD KE-19 HINGGA AKHIR MASA KOLONIAL/Any Rahmayani, Dana Listiana, Ina Mirawati; editor, Veni Putri-cet. 1-Yogyakarta: DIVA Press, 2018

108 hlmm; 15, 5 x 23 cm

ISBN 978-602-391-689-4

I. Penelitian

II. Veni Putri

I. Judul

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



ABSTRAK

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan tentang diaspora orang Bugis di Kesultanan Pontianak dalam membangun relasi ekonomi dengan masyarakat setempat seiring kebijakan pemerintahan di wilayah tersebut. Oleh karenanya penulis mengurainya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yaitu (1) Bagaimana sejarah kedatangan orang-orang Bugis dan keadaan umum di Kesultanan Pontianak baik keadaan geografis, politik serta masyarakatnya? (2) Bagaimana aktivitas ekonomi kelompok Bugis di Kesultanan Pontianak pada abad ke-19 hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda? Kajian ini mendapatkan simpulan bahwa ini mendapatkan kesimpulan bahwa (1) migrasi Bugis pada paruh kedua abad ke-19 didominasi oleh proses migrasi melalui praktik *pandelingschap* (2) Dalam membuka permukiman dan menjalankan aktivitas ekonomi, migran Bugis menjalani dengan filosofi Bugis (2) Dalam menjalankan aktivitas baik sosial maupun ekonomi, migran Bugis berdampingan dengan kelompok masyarakat lain terutama Melayu dan Cina. Dengan masyarakat Melayu selain hubungan yang bersifat ekonomi mereka juga menjalin perkawinan. Ikatan perkawinan berpengaruh tidak saja pada percampuran budaya tetapi

juga secara politis terutama pada status ke-abdi-an (*kekawulaan/ onderdanship*) mereka dalam otoritas pemerintahan Kesultanan Pontianak. Orang Bugis dipandang telah menghidupkan sumber-sumber keuangan di Kalimantan Barat



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



KATA PENGANTAR

Tulisan ini mengajak pembaca memahami proses diaspora orang Bugis di Kesultanan Pontianak dalam membangun relasi ekonomi dengan masyarakat setempat seiring kebijakan pemerintahan di wilayah tersebut. Kemampuan mereka dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses adaptasi secara ekonomi (dan politik tentu saja) memiliki arti penting dalam sejarah Kesultanan Pontianak pada khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya.

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk terus berkarya. Penulisan sejarah merupakan salah satu usaha untuk melestarikan bentuk peninggalan masa lampau dalam kerangka teoritis. Harapan penulis semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis. Lebih jauh lagi, penulis memiliki harapan bahwa tulisan ini memiliki kontribusi bagi para penentu kebijakan dalam mendesain hal-hal yang terkait dengan perdagangan dan pelabuhan.

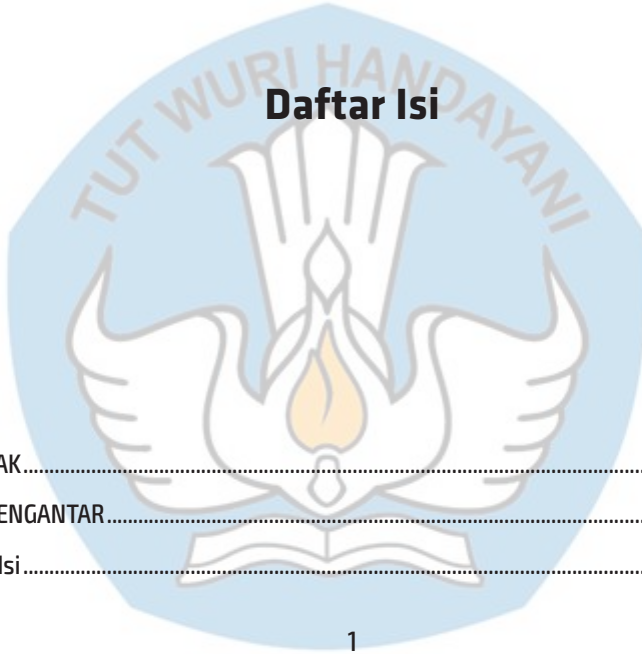
Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan atas hadirnya kajian ini. Balai

Pelestarian Nilai Budaya beserta seluruh stafnya yang telah memfasilitasi penelitian ini, Perpustakaan Nasional dan staf yang telah menyediakan banyak bahan bacaan yang berharga, Arsip Nasional Republik Indonesia yang memiliki sumber primer yang tidak ternilai harganya, dan tentunya seluruh informan yang menyediakan informasi-informasi berharga yang tidak tercatat dalam dokumen.

Selamat Membaca..



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



Daftar Isi

ABSTRAK.....	3
KATA PENGANTAR.....	5
Daftar Isi.....	7

1

PENDAHULUAN

Balai Pelestarian Nilai Budaya ORANG BUGIS DAN PERANTAUANNYA Kalimantan Barat DI PONTIANAK

1. Sekilas Aktivitas Ekonomi Orang Bugis di Perantauan.....	27
Aktivitas Ekonomi Orang Bugis di Borneo bagian Timur dan Selatan..	27
Aktivitas Ekonomi Orang Bugis di Jawa.....	30
Aktivitas Ekonomi Orang Bugis di Pulau Sumatra	30
Aktivitas Ekonomi Orang Bugis di Semenanjung Malaka.....	31
Aktivitas Ekonomi Orang Bugis di Kerajaan-Kerajaan di sekitar Kesultanan Pontianak	32

2.	Keadaan Umum Wilayah Dan Masyarakat Pontianak.....	35
	Keadaan dan Potensi Alam Pontianak	35
	Penduduk.....	39
3.	Jaringan Awal Orang Bugis di Pontianak	40
4.	Orang Bugis di Pontianak dalam Pandangan Kolonial dan Kesultanan Pontianak.....	43
5.	Permukiman Komunitas Bugis di Pontianak.....	46

III

AKTIVITAS EKONOMI KOMUNITAS BUGIS
DI KESULTANAN PONTIANAK PADA PARUH KEDUA ABAD KE-19

1.	Aktivitas Ekonomi Migran Bugis Pendahulu	49
2.	Migran Baru Bugis.....	53
	Kedatangan <i>Pandeling</i> Bugis	53
	Aktivitas Ekonomi Migran Bugis Baru.....	66
	Sistem Patronase dalam Aktivitas Orang Bugis	73

IV

AKTIVITAS EKONOMI KOMUNITAS BUGIS DI KESULTANAN PONTIANAK

PADA AWAL ABAD KE-20 HINGGA BERAKHIRNYA MASA KOLONIAL

1.	Aktivitas Ekonomi di Permukiman Bugis Awal Abad ke-20	80
	Kedatangan Migran Bugis di awal abad ke-20	82
	Aktivitas Ekonomi Migran Bugis di Awal Abad ke-20.....	84
2.	Hubungan Ekonomi antara Pekebun Bugis, dan Pedagang Cina serta Kantor Dagang Barat.....	87
	Para Saudagar Bugis.....	88
	Parit sebagai Investasi Modal.....	92
	Bugis dan Cina dalam Pengolahan Kopro dan Minyak Kelapa	93
	Perkebunan milik perusahaan swasta di sekitar permukiman Bugis..	96

V

PENUTUP

Simpulan.....	99
Saran	102
Daftar Bacaan.....	103



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



1 PENDAHULUAN

Nama orang Bugis kerap dijadikan identitas wilayah di Pontianak. Sebut saja Parit Haji Jali, Parit Haji Haruna, dan Kampung Haji Adam adalah sedikit dari sejumlah kawasan yang disebut masyarakat setempat sebagai nama haji Bugis. Belum lagi sederet nama jalan dan gang seperti Jl. Parit Haji Husin, Jl. Parit Haji Muksin, Gg. Ambo' Tin, Gg. Ambo' Pasir, Gg. Wak Dalek, dan Gg. H. Thaha yang menurut cerita penduduk lokal adalah nama para pemuka Bugis di permukiman tersebut.

Penamaan jalan atau tempat dari nama orang di suatu wilayah sering dikaitkan dengan peran penting seseorang, peristiwa terkait seseorang di tempat tersebut, atau yang paling sering adalah kisah pembukaan lahan. Perihal terakhir adalah alasan umum yang disampaikan masyarakat sekitar atas lokasi-lokasi itu.

Kisah pembukaan lahan selaras dengan fenomena hukum yang belakangan muncul di Pontianak. Sengketa tanah milik orang-orang Bugis dengan luas lahan cukup fantastis menjadi perkara lazim yang

dibincangkan. Sebuah kasus yang sempat mengemuka di koran-koran lokal dan hingga kini masih menjadi pembicaraan penduduk kota juga terkait areal permukiman beridentitas Bugis yang konon masih menjadi milik warisnya. Sengketa tanah ini menjadi berita terkenal karena melibatkan tokoh daerah keturunan Kesultanan Pontianak dan terjadi di distrik pusat bisnis Kota Pontianak (Tribun Pontianak, Oktober 2013: 9; 15)¹.

Kedua gejala tersebut memunculkan pertanyaan awam berkenaan orang Bugis dan lahan. Mengapa orang-orang Bugis tersebut memiliki tanah begitu luasnya? Menyusul pertanyaan-pertanyaan seputar diri mereka, seperti siapa sebenarnya mereka?, jika mereka orang Bugis, kapan mereka datang dan apa yang mereka lakukan di Pontianak. Berangkat dari pemikiran awam tersebut, kami berasumsi bahwa orang Bugis di Pontianak pernah memiliki aktivitas terkait lahan. Penelusuran para perantau Bugis dari sejumlah literatur pun kami lakukan.

Namun tanpa mengurangi peran Bugis pada sejarah kelautan Indonesia, agaknya kemampuan mereka dalam aktivitas ekonomi di tempat tujuan memperlihatkan bahwa mereka sangat terlatih mengolah alam menjadi sesuatu yang menguntungkan secara ekonomi. Kata kajian ini berawal dari banyaknya kajian-kajian diaspora Bugis yang ada pada umumnya menitikberatkan tinjauan diaspora secara politik dan sosial. Sementara itu kajian khusus diaspora Bugis secara ekonomi khususnya di wilayah Borneo Barat nampaknya masih sedikit atau bahkan belum tersentuh sama sekali. Hal ini menjadi salah satu latar belakang pemilihan judul ini.

¹ Andre, "Warga Gang Haji Thaha Mengungsi di FRKP," dalam *Tribun Pontianak* 25 Oktober 2013, hlm. 9; 15.

Dari beberapa fase migrasi orang Bugis di Borneo bagian barat nampaknya periode migrasi pada pertengahan abad ke-19 adalah yang paling berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi baik dalam hal perdagangan, pertanian, maupun perkebunan. Aktivitas ekonomi kelompok Bugis di Borneo bagian barat telah terlihat pada abad 17-18 (bahkan sebelum itu kelompok-kelompok kecil Bugis telah menjalin hubungan dengan penguasa-penguasa di pesisir barat dan selatan Borneo). Hubungan orang-orang Bugis dengan penguasa Melayu terlihat jelas pada periode ketika Kesultanan Sambas menguasai jalur perdagangan sebelum terintervensi oleh pemerintah kolonial pada 1818. Kala itu, penguasa Sambas, yang juga merupakan peniaga, bekerjasama dengan pemilik perahu Bugis baik dalam peminjaman perahu ataupun pengelolaan perahu dagang. Pangeran Tumenggung mengikat kontrak dengan Anakhoda Toneri dan Anakhoda Uwan Yusup untuk mengangkut barang-barang dagang Pangeran Tumenggung yang akan diperjualbelikan di luar negeri. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, para anakhoda membeli barang-barang kebutuhan masyarakat Sambas yang hanya didapat dari perdagangan luar negeri untuk kemudian diserahkan kepada Pangeran Tumenggung. Pangeran Tumenggunglah yang nantinya akan mendistribusikan barang-barang tersebut baik ke daerah pesisir maupun daerah pedalaman dengan sistem barter (Ismail, 1985:139).

Keberlangsungan hidup kelompok Bugis di wilayah barat Borneo berkaitan juga dengan keberhasilan kelompok ini dalam menerapkan strategi adaptasi dengan penguasa dan penduduk lokal sebagaimana diungkapkan Andaya dalam kajiannya mengenai diaspora Bugis dan Makassar. Contoh kongkritnya dapat dilihat dari hubungan Sultan Sambas bekerjasama dengan perahu-perahu layar Bugis dalam pendistribusian dan perdagangan candu sebelum 1818. Pembagian keuntungan atas candu ini didasarkan pada Undang-Undang Pelayaran

Bugis dan Undang-Undang Malaka yang menyatakan bahwa pemilik barang dan pengangkut mengambil keuntungan yang sama dalam perdagangan tersebut. Selanjutnya seperdua dari keuntungan yang menjadi hak pengangkut dibagi lagi dengan pemilik kapal, nahkoda dan anak buah kapal (Ismail, 1985: 141).

Gelombang kedatangan orang-orang Bugis di Pontianak semakin besar pada saat pemerintahan Syarif Yusuf Alkadrie setelah tahun 1872 (Enthoven: 2013: 263; W.P.,2008: 152). Kelompok orang Bugis ini kebanyakan menempatkan diri di daerah Sungai Kakap. Selain itu mereka membuka permukiman di Peniti, ibukota Pontianak, dan Kampung-Kampung di pinggir Kapuas. Mereka hidup terutama di Mempawah dan Sungai Kakap dan mereka tetap menjaga hubungan dengan tanah air mereka, sebagian besar dari Wajo, sebagian dari Mandar dan Luwu. Bahkan diduga sistem pemerintahan dari daerah asal mereka dapat diterapkan di wilayah ini. Kepala kampung di Sungai Kakap disebut *matuwa* sedangkan kepala pemerintahannya bergelar *bupati indra* (Enthoven, 1903:851). Mereka mempertahankan karakter mereka sendiri yang berbeda dengan karakter lainnya. Berdasarkan sifatnya, mereka semula adalah pedagang, kemudian mereka menjadi pembantu (budak/pegawai) dari bangsawan Melayu. Diantara mereka banyak yang telah bebas namun pada dasarnya mereka memiliki sifat sabar, hemat dan berperilaku baik (*Memorie van Mr H.W. Mutinghe 1821 dalam Sandick dan Marle, 1919: 19-20*).

Wilayah Sungai Kakap memiliki daerah yang subur untuk pembudidayaan tanaman terutama kelapa. Namun tanah yang sebagian besar dimiliki oleh bangsawan Melayu ini tidak memiliki tenaga kerja yang cukup untuk mengolahnya. Pemerintahan kesultanan telah mencoba perekrutan terhadap orang-orang Melayu melalui sistem *pandelingschap* (perbudakan karena utang/*debt slave*) dan juga yang mereka sebut “anak mas”. Kepada mereka dijanjikan bahwa

hutang-hutang mereka akan dianggap lunas jika mereka mau tinggal dan mengerjakan kebun-kebun di wilayah tersebut selama 4-5 tahun (Enthoven, 2013: 267). Namun nampaknya usaha ini kurang berhasil. Cara lain yang ditempuh kemudian adalah merekrut orang-orang Bugis dengan kapal-kapal. Secara administratif mereka dicatat oleh pemerintah sebagai orang bebas. Perjanjian atau kontrak kerja telah ditandatangani sebelum mereka tiba di Pontianak. Termasuk di dalamnya adalah gaji sebesar 10 dollar setahun ditambah nafkah, penginapan dan pakaian (Enthoven, 2013: 268). Orang-orang Bugis ini mengeringkan daerah pesisir di Sungai Kakap dimana parit panjang digunakan untuk pengeringan dan transportasi (Heidhues, 2008: 159; Enthoven, 1903: 813).

Usaha tersebut nampaknya membuahkan hasil. Orang-orang Bugis pada periode 1850 dan setelahnya tergolong makmur dan andil keberhasilan perkebunan kelapa cukup besar di dalamnya. Dari laporan statistik haji tahun 1869 dan 1880 terlihat bahwa jumlah jamaah meningkat dari 43 orang menjadi 237 orang (Laporan Umum 1880, Residen Kater, 8 Februari 1881, ANRI BW 5/11 (26) dalam Heidhues, 2008: 159).

Sebuah kasus menarik pada tahun 1920 ketika kelompok Bugis dari wilayah Pontianak yang bermigrasi ke Johor dan menemukan lahan yang cocok untuk membudidayakan kelapa. Mereka merupakan salah satu pemukim pertama di area perkebunan yang dimiliki oleh sebuah keluarga Arab yang kaya.² Pengalaman mereka di Pontianak membuat mereka mampu mengembangkan penanaman kelapa dan perdagangan kopra. Bahkan mereka menyediakan modal (peralatan, benih dan lainnya) dan selanjutnya mampu meminjamkan uang pada pengikut mereka yang akan membuka lahan baru (Ammarell, 2002: 58).

² Pemukim lain adalah orang-orang Tionghoa dan Jawa yang terikat kontrak sebagai buruh pada keluarga Arab tersebut.

Informasi-informasi tentang aktivitas ekonomi kelompok Bugis di Borneo Barat khususnya *Afdeeling* Pontianak di atas, banyak ditemukan secara tersebar pada beberapa sumber baik primer maupun sekunder. Oleh karenanya, penulis bersama tim akan mencoba mengumpulkan, menginterpretasi dan merangkai informasi ini dalam sebuah kajian sejarah yang kronologis dalam judul “Aktivitas Ekonomi Orang-Orang Bugis di Kesultanan Pontianak pada Abad ke-19 hingga Akhir Masa Kolonial.”

Uraian di atas merupakan latar belakang bagi sebuah pertanyaan utama, bagaimana hubungan kerjasama antara komunitas diaspora Bugis dengan lingkungan barunya sehingga mampu hidup dan berkembang di Pontianak dalam kurun waktu yang cukup lama? Untuk mengurai pertanyaan utama tersebut maka penulis membaginya pada beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana sejarah kedatangan orang-orang Bugis dan keadaan umum di Kesultanan Pontianak baik keadaan geografis, politik serta masyarakatnya?
2. Bagaimana aktivitas ekonomi kelompok Bugis di Kesultanan Pontianak pada abad ke-19
3. Bagaimana aktivitas ekonomi kelompok Bugis di Kesultanan Pontianak pada awal abad ke-20 hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda?

Pembahasan tentang aktivitas ekonomi orang Bugis di Kesultanan Pontianak ini dibatasi oleh tiga batasan yaitu batasan spasial, batasan temporal, dan batasan tema. Pembatasan perlu dilakukan supaya pembahasan tidak terlalu meluas atau menjadikannya seperti tulisan dalam ilmu sosial lain karena sejarah diartikan sebagai peristiwa dalam waktu dan tempat tertentu.

Tema penelitian kali ini dititikberatkan pada aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh kelompok Bugis sebagai bagian dari proses diaspora yang mereka lakukan. Kemampuan mereka dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses adaptasi secara ekonomi (dan politik tentu saja) akan diurai lebih mendalam dalam substansi penelitian ini.

Mengacu pada penataan wilayah administrasi kolonial yang berubah-ubah sepanjang abad ke-19 sampai awal abad ke-20, penting kiranya pembaca memahami batasan wilayah penelitian berdasarkan periode-periode penataan administrasi. Pemilihan wilayah penelitian dirumuskan dalam ruang lingkup spasial Kesultanan Pontianak. Lingkup wilayah tersebut diterjemahkan dalam tata administrasi wilayah masa kini sebagai Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Hal ini mengacu pada beberapa hal berikut.

Beberapa wilayah yang didominasi oleh kelompok Bugis berada dalam sebuah wilayah yang secara administratif berubah secara signifikan pada beberapa periode. Sebagai gambaran adalah wilayah Sungai Kakap. Oleh pemerintah Hindia Belanda, *zelfbesturendlandschap* (pemerintah kesultanan)³ Pontianak sebelum 1916 dibagi menjadi 2 yaitu *Afdeeling Pontianak en Ommelanden* dan sebagian *Afdeeling Sungai Kakap*. *Afdeeling Pontianak en Ommelanden* mencakup wilayah ibukota Pontianak dan sebagian koloni Cina di Mandor yang pecah pada 1884. Sedangkan *Afdeeling Sungai Kakap* meliputi wilayah

³ *Zelfbesturendlandschap* (pemerintah otonom kesultanan) merupakan hasil kesepakatan politik antara penguasa setempat dengan Pemerintah Hindia Belanda. *Zelfbesturendlandschap* adalah satuan wilayah yang menerapkan dualisme pemerintahan, kolonial dan kesultanan. Sistem pemerintahan ini dibentuk oleh pemerintah kolonial dengan membiarkan raja-raja setempat memerintah wilayah kerajaannya sendiri meski mengakui kekuasaan tertinggi ada pada Belanda. Wilayah-wilayah kerajaan tetap dipertahankan dengan sebutan *landschap* (lanskap) atau *zelfbestuurendlandschap*. *Zelfbestuurendlandschap* sering juga disebut dengan istilah *autonome landshappen* yakni sebuah wilayah yang tidak diperintah secara langsung oleh pemerintah Hindia Belanda (Keterangan di atas dikutip dari Listiana, 2017:58).

Sungai Kakap, Peniti, Ambawang dan yang sebagian wilayahnya masuk dalam wilayah *zelfbesturendlanschap* Kubu. Perubahan terjadi segera setelah terbitnya *Besluit* 18 Agustus 1916 No.11 yang membagi wilayah administrasi di Keresidenan *Borneo Westerffdeeling* menjadi empat wilayah *Afdeeling* yaitu *Afdeeling* Singkawang, Pontianak, Ketapang, dan Sintang. Wilayah-wilayah yang tadinya masuk dalam *Afdeeling* Pontianak en *Ommmelanden* dan *Afdeeling* Sungai Kakap dilebur menjadi satu dengan sebutan *onderafdeeling* Pontianak. *Onderafdeeling* Pontianak ini merupakan bagian dari *Afdeeling* Pontianak.⁴ Oleh karenanya, pembahasan ini akan menyertakan wilayah *Afdeeling* Sungai Kakap yang sebelum 1916 terpisah secara administrasi dengan *Afdeeling* Pontianak.⁵

Pembatasan periodisasi dimulai pada tahun 1850 berdasarkan fase kedatangan kelompok-kelompok Bugis ke Borneo bagian barat untuk membuka permukiman dan perkebunan kelapa, tanpa menanggapi kedatangan mereka sebelum periode itu. Tahun 1850 merupakan periode rintisan pengembangan perkebunan kelapa oleh orang-orang Bugis. Pertambahan penduduk Bugis di Pontianak nampak signifikan pada periode ini. Walaupun pada 1851-1880 jumlah penduduk Bugis tidak secara jelas terlihat karena pemerintah kolonial memasukkan orang Bugis dalam satu kelompok dengan orang Melayu. Tahun 1851 jumlah orang Melayu dan Bugis di Borneo Barat adalah 19.170 jiwa. Satu dekade berikutnya sejumlah 69.137 jiwa dan terus meningkat di tahun 1870 sebanyak 77.675 jiwa dan tahun 1880 berjumlah 103.038 jiwa (Borneo West No. 14 *Algemene Verslag* tahun 1851; Borneo West no. 27 Laporan umum tentang Borneo Barat tahun 1880). Sementara batas akhir pada akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda di saat segala regulasi

⁴ Selain *onderafdeeling* Pontianak, wilayah yang berada di bawah *afdeeling* Pontianak adalah *Onderafdeeling* Landak dan *Onderafdeeling* Sanggau.

⁵ Informasi tentang administrasi kolonial didapat dari *Regerings Almanak* berbagai tahun

tentang orang-orang Bugispun berakhir. Batasan akhir ini juga mencakup meliputi kemunduran harga kelapa disusul karet sebagai komoditi yang diusahakan oleh sebagian besar pemukim Bugis di Kesultanan Pontianak. Batasan periode awal dan akhir ini akan membantu penulis untuk melihat dinamika aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh kelompok Bugis di Pontianak.

Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk menggambarkan aktivitas ekonomi orang Bugis di Kesultanan Pontianak pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dengan mengetahui (1) sejarah kedatangan orang-orang Bugis Di Borneo bagian barat, khususnya di Kesultanan Pontianak serta keadaan umum di Kesultanan Pontianak baik keadaan geografis, politik serta masyarakatnya (2) aktivitas ekonomi kelompok Bugis di Kesultanan Pontianak pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 sampai berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Berkaitan dengan tujuan tersebut, penulis berharap hasil penelitian sejarah ini dapat memberikan manfaat sebagai rujukan akademis dalam membahas tema-tema diaspora mengingat banyaknya kelompok etnis di Nusantara yang menyebar hingga kini. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini nantinya memiliki manfaat praktis bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan ekonomi terutama komoditi perkebunan. Lebih jauh, penulis berharap karya ini nantinya memiliki kontribusi yang solutif bagi pemerintah menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diaspora. Serta menjadi bahan bacaan bagi pemerhati, masyarakat akademis dan masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam bidang diaspora.

Diaspora Bugis sebagai titik tolak tulisan ini dikupas baik oleh Leonard Y. Andaya dalam *The Bugis-Makassar Diasporas*. Andaya membandingkan dengan baik perbedaan keberhasilan antara perantau Bugis dan perantau Makassar. Dengan latar belakang sejarah pada

periode modern awal Asia Tenggara (1500-1800), ia mengungkapkan eksodus orang-orang dari wilayah Sulawesi bagian selatan menuju pulau-pulau lain seperti Sumbawa, Lombok, Bali, Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaka dan Borneo bagian Barat dan Selatan. Para pendatang ini merupakan korban perang dan orang-orang yang merasakan ketidakadilan dari para penguasa dan bangsawan yang memiliki kekuatan penuh. Perantau Makassar merupakan kelompok yang hebat, dengan pangeran yang memimpin kelompok berjumlah ratusan orang. Pada mulanya mereka disambut hangat kedatangannya oleh sekutu mereka bahkan mereka ditawari permukiman permanen. Namun status yang tinggi dari pemimpin mereka dan jumlah mereka yang besar menciptakan problem hukum yang tidak teratasi. Perantau Makassar dianggap membahayakan bagi kepentingan perdagangan VOC. Ekspedisi militer pada Perang Makassar akhirnya menyerang kelompok ini pada 1667. Berbeda dengan perantau Makassar, diaspora perantau Bugis di Semenanjung Malaka, Sumatra bagian selatan dan barat dapat dikatakan lebih sukses. Meskipun ada kesamaan tentang bagaimana perlakuan kerajaan lokal terhadap para pendatang tersebut, penyebab kesuksesan orang-orang Bugis adalah perpaduan keadaan sejarah dan pembaharuan Bugis yang unik. Kelompok Bugis menjadi mapan di ranah Melayu dan di Sumatera barat daya dan yang sedikit lebih disegani daripada di daerah Jawa dan Sumatera yang mana menjadi harapan kelompok Makassar untuk menetap. Selain itu, pembesarpembesaran Bugis tidak terlalu menjadi ancaman bagi penguasa lokal dan perusahaan perdagangan Eropa dibanding pangeran-pangeran kerajaan Makassar. Namun perbedaan yang paling penting adalah fakta bahwa Bugis mampu menciptakan pemerintahan diaspora yang sukses didasarkan pada asimilasi efektif lembaga politik Bugis dan nilai-nilai budaya dalam kerangka lokal.

Pendapat Andaya ini dijamin oleh Susanto Zuhdi dalam *Kemaritiman dan Migrasi Orang Bugis*. Perbandingan diaspora antara Bugis dan Makassar dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pada wilayah yang dituju. Orang Makassar pergi ke pantai utara Jawa dari bagian barat sampai timur yang mana telah memiliki pusat kekuasaan yang mapan. Sikap pendatang Makassar yang lebih tinggi strata sosialnya jelas merupakan hambatan dalam proses adaptasi. Sebaliknya, orang-orang Bugis lebih cenderung pergi ke wilayah barat yang sebagian besar wilayahnya memiliki penduduk yang relatif jarang, bahkan terkadang merupakan daerah yang tidak stabil secara politik sehingga berpotensi konflik. Hal ini tentu cocok bagi jiwa petarung seperti orang-orang Bugis. Sebagaimana diperlihatkan oleh pendatang Bugis yang berasal dari Luwu yaitu lima putra Daeng Rilaga (Daeng Parani, Daeng Menambon, Daeng Marewa, Daeng Cellak dan Daeng Kemasi) yang menjadi agen perubahan yang strategis bagi dunia politik wilayah yang didatangi. Kedua, latar belakang pendatang Bugis yang berasal dari golongan bawah tampaknya lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat setempat. Ketiga adalah karakter orang Bugis yang disebut sebagai orang yang agresif, rajin, cerdas, pembuat perahu yang trampil dan pedagang yang lihai serta dapat dipercaya. Singkatnya bahwa migrasi yang dilakukan oleh orang-orang Bugis baik dari Wajo maupun Luwu (dan dari daerah lain) memperlihatkan dua pola yaitu horizontal (migrasi orang Bugis mengisi dan membentuk masyarakat baru) dan vertikal (kemampuan orang Bugis khususnya 5 Daeng dan pengikutnya dalam mempengaruhi dan memantapkan struktur kekuasaan yang ada di dunia Melayu).

Berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kewirausahaan orang Bugis, Gene Ammarell menyinggungnya dalam tulisan berjudul *Bugis Migration and Modes of Adaptation to Local Situation*. Pada saat orang-orang Bugis masih melakukan aktivitas perdagangan di per-

tengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda secara bertahap mulai membangun kontrol terhadap aktivitas ekonomi. Sementara itu, pengenalan kapal uap dan pembukaan Terusan Suez meningkatkan permintaan Eropa terhadap produk-produk tropis, serta mendorong pembukaan lahan-lahan perkebunan tanaman niaga baru. Menghadapi hal tersebut, orang-orang Bugis di Johor, Malaya, Sumatra serta wilayah lain, segera menanam kelapa untuk memproduksi kopra dan tanaman niaga lain seperti karet dan padi. Periode akhir abad ke-19 sampai berakhirnya Perang Dunia II, pendatang Bugis yang meningkat di bawah kekuasaan Belanda, mampu bekerjasama dengan pemerintah kolonial atau setidaknya mampu menyediakan kebutuhan pemerintah kolonial dalam mencapai tujuan ekonominya. Selanjutnya, pada awal terbentuknya Republik Indonesia, mereka melanjutkan hal yang sama baik di bidang pertanian maupun perdagangan kecil. Artinya adalah bahwa orang-orang Bugis mampu menangkap peluang yang ada.

Berbicara tentang aktivitas ekonomi yang dilakukan para perantau Bugis tentu tidak dapat dilepaskan dari konsep patron-klien. Sistem ini memungkinkan terjadinya mobilitas sosial, kerjasama antarstrata sosial dan integrasi dalam berbagai kelompok yang tidak memperhitungkan batas wilayah (Pelras, 2006 : 203). Pelras dalam bukunya *Manusia Bugis* menyatakan bahwa setiap bangsawan Bugis berada di tengah-tengah jaringan yang mengikatkan padanya sejumlah pengikut yang besar. Dan seorang pengikut akan menyatakan kesediaannya memenuhi seluruh perintah patronnya (Pelras, 2006 204). Ketergantungan pengikut pada tuannya inilah yang sering menyebabkan hubungan patron klien ini disamakan dengan hubungan perbudakan. Padahal pada kenyataannya, terdapat satu aspek yang membedakan keduanya. Aspek tersebut adalah status hukum pengikutnya yaitu *to-maradeka* yang berarti orang bebas) yang berarti bahwa para pengikut tersebut bebas memisahkan diri,

tidak boleh diperlakukan semena-mena dan haknya dilindungi oleh hukum adat. Sang patron harus melindungi pengikutnya dan bertanggungjawab atas kesejahteraan pengikutnya dengan menyediakan lahan, ternak dan alat yang dibutuhkan. Hubungan patron dan klien terjalin secara sukarela, dapat berakhir kapan saja dan sepanjang klien tidak memiliki hutang pada patronnya, ia bebas untuk berpindah ke patron yang lain. Demikian juga patron dapat memberhentikan pengikutnya jika tidak memenuhi kewajibannya. Namun biasanya kedua belah pihak selalu berusaha menjaga hubungan mereka. Yang tidak kalah penting bahwa secara ekonomi seorang patron harus mendistribusikan kekayaan kepada pengikutnya.

Sebagai sebuah kajian sejarah, tulisan ini disusun secara diakronis yang lebih mengutamakan memanjangnya lukisan berdimensi waktu dengan sedikit luasan ruang (Kuntowijoyo, 2003: 43). Seperti kita ketahui bahwa ada empat tahap dalam metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Tahap heuristik sebagai tahapan pertama dengan proses menemukan, mengumpulkan sumber dan mengidentifikasi sumber akan dilakukan pada pertengahan bulan Maret dengan melakukan studi di lapangan yaitu Jakarta, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Penelitian di Jakarta akan dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional. Pemilihan dua lokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan sumber primer berupa arsip dan informasi dari media sezaman serta sumber sekunder berupa artikel sezaman, yang nampaknya akan memberikan sumbangan terbesar bagi penelitian ini. Penelusuran arsip yang berfungsi sebagai sumber informasi primer akan dilakukan di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). *Memorie van Overgave West Borneo* adalah salah satu koleksi arsip yang dikelompokkan berdasarkan wilayah.

Arsip ini biasanya berisi memori serah terima jabatan sekaligus laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah pada akhir masa jabatannya ke pemerintah pusat. Laporan ini biasanya memuat berbagai komponen seperti keadaan alam, penduduk, sejarah, sistem politik tradisional, hasil hutan, perikanan, laporan kriminal, lahan pertanian, perdagangan, sarana dan prasarana lalu lintas dan lain sebagainya. Khasanah arsip lain adalah *Koloonial Verslag/Indisch Verslag* yang merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban menteri atas seluruh daerah di Hindia Belanda. Laporan ini diterbitkan tahunan. Untuk melihat peraturan resmi atas sebuah aspek dan wilayah administratif sebuah wilayah dapat dilihat dalam *Indisch Staatblad* dan *Regering Almanak van Nederlandsch Indie*. *Enchiclopaedie van Nederlandsch Indie* yang juga dapat ditemukan di ANRI digunakan sebagai langkah awal dalam mengenali wilayah dan tema yang akan ditulis. Demikian pula dengan foto, peta ataupun sketsa.

Penelusuran di Perpustakaan menemukan informasi yang tidak kalah penting yang didapatkan dalam beberapa artikel surat kabar baik nasional maupun lokal (Pandji Pustaka, Oetoesan Borneo, Borneo Barat Bergerak), majalah kolonial maupun jurnal (*Tijdschrift Economische Geographie, De Indische Gids*). Beberapa laporan dari pejabat yang pernah tinggal di Borneo Barat telah dibukukan dan dapat ditemukan di Perpustakaan Nasional seperti *Verslag eener Sporwegverkenning in Noorwest-Borneo. Dienst Der Staats-Spoor-en Tramwegen*. Buku-buku pendukung lain didapatkan dari Perpustakaan BPNB Pontianak, Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat dan koleksi pribadi penulis. Pengumpulan data berupa sumber lisan dilakukan dengan wawancara dan pengamatan di permukiman-permukiman Bugis baik di Kota Pontianak maupun Kabupaten Pontianak akan mendukung studi literatur yang dilakukan

Langkah kedua adalah kritik, baik intern dan ekstern, sebagai langkah untuk mengetahui kelayakan dan keabsahan informasi yang diperoleh. Setelah itu adalah interpretasi terhadap berbagai informasi yang telah ditemukan pada akhirnya dijalin menjadi jalinan yang kronologis dalam batasan tempat dan waktu dalam proses terakhir dalam penelitian yaitu historiografi. Ketiga proses ini akan dilakukan secara berurutan setelah penelitian lapangan.

Bagian pertama tulisan ini adalah bagian pendahuluan yang berisi kerangka penulisan yang memuat latar belakang sebagai uraian dan alasan yang mendasari pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan baik secara akademis maupun praktis, ruang lingkup penelitian (baik spasial, temporal maupun tema), metode dan sumber sejarah yang digunakan, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

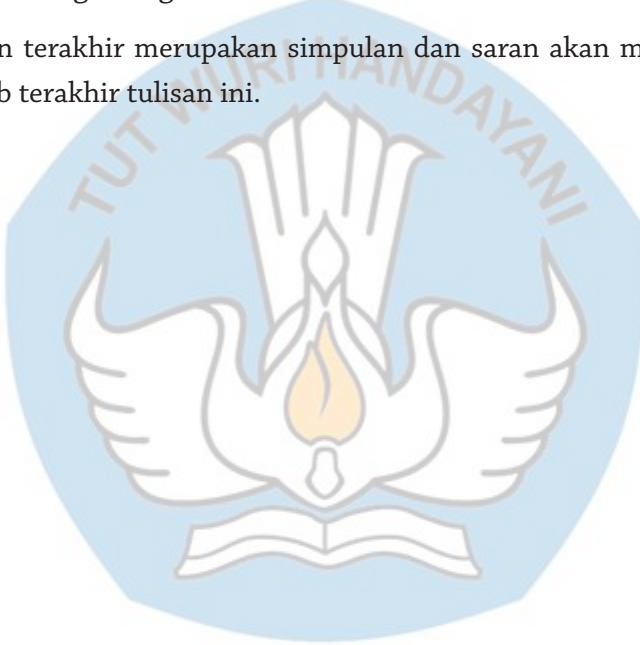
Adapun bagian kedua menjelaskan tentang sejarah kedatangan orang-orang Bugis Di Borneo bagian barat, khususnya di Kesultanan Pontianak. Di dalamnya akan digambarkan (1) sekilas aktivitas ekonomi orang Bugis di perantaraan lain (2) Keadaan umum wilayah dan masyarakat Pontianak (3) Jaringan awal orang Bugis di Pontianak (4) Permukiman awal orang orang Bugis di Pontianak

Bagian ketiga membahas tentang aktivitas ekonomi komunitas Bugis di wilayah Kesultanan Pontianak pada awal abad ke-19 termasuk beberapa fase kedatangan mereka pada abad ke-19 yang tentunya memiliki proses dan dinamika yang tidak sama. Proses dan dinamika tersebut akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi mereka di awal abad ke-20 nantinya

Bagian keempat berkaitan dengan aktivitas ekonomi kelompok Bugis di Kesultanan Pontianak pada awal abad ke-20 hingga akhir masa kolonial. Pada bab ini akan dibahas tentang (1) respon mereka

terhadap ekonomi pasar dunia (2) hubungan kerjasama ekonomi orang-orang Bugis dengan penguasa Melayu (3) kedatangan migran Bugis di awal abad ke-20 yang proses dan faktor penariknya berbeda dengan kedatangan migran di abad ke-19.

Bagian terakhir merupakan simpulan dan saran akan menjadi isi dari bab terakhir tulisan ini.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

II ORANG BUGIS DAN PERANTAUANNYA DI PONTIANAK

Any Rahmayani & Ina Mirawati

1. Sekilas Aktivitas Ekonomi Orang Bugis di Perantauan

Aktivitas ekonomi orang Bugis di perantauan menjadi satu pengantar untuk melihat bagaimana adaptasi orang Bugis di Kalimantan bagian barat jika dibandingkan dengan pola migrasi dan adaptasi orang Bugis di tempat yang lain.

Balai Pelestarian Nilai Budaya

Aktivitas Ekonomi Orang Bugis di Borneo bagian Timur dan Selatan

Perjanjian Bungaya 1667 merupakan sebab pertama migrasi orang Bugis ke luar wilayah asalnya selain naluri *passompe* (perantau) yang tumbuh dalam jiwa mereka. Jaringan perantau Bugis dimulai oleh seorang pemuda bangsawan Wajo, La Madukelleng atau yang dikenal dengan Arung Singkang, yang pergi menuju Kerajaan Pasir. La Madukelleng menjalin hubungan politik dan perkawinan dengan

penguasa Pasir sampai pada akhirnya ia menjadi Sultan Pasir. Mulai saat itu gelombang migrasi orang Bugis mulai mendatangi wilayah Borneo bagian Timur dan Selatan. Hubungan politik dengan Sultan Kutai membuatnya mampu mengorganisir kelompok-kelompok Bugis di kawasan pesisir timur Borneo melalui pemimpin-pemimpin permukiman Bugis. Apalagi setelah ia diberi izin oleh Sultan Kutai untuk mendirikan permukiman yang strategis di dekat Muara Sungai Mahakam yang merupakan jantung ibukota Kerajaan Kutai (Pelras, 2006: 372). Orang Bugis datang ke Kutai dengan perahu-perahu. Selanjutnya mereka menetap dengan mendirikan perkampungan yang otonom dengan seorang pemimpin yang disetujui oleh Sultan Kutai. Pemimpin Bugis dikenal dengan Pua Adu. Secara ekonomi, seorang Pua Adu memiliki penghasilan dari pembayaran tiap kapal yang naik ke darat, pembayaran tiap kapal yang berlabuh serta pembayaran untuk setiap rumah keluarga Bugis yang hendak didirikan. Sedangkan di Samarinda, pimpinan orang Bugis dikenal dengan nama Kepala Manang. Kepala Manang merupakan kepala sebuah dewan keluarga Bugis. Pua adu berada di bawah kekuasaannya. Kepala Manang memiliki peran ekonomi yang cukup besar dimana merekalah yang menampung dan melindungi serta memberi bantuan orang-orang Bugis dari Sulawesi yang baru datang (Parani, 2015:8). Komunitas Bugis kemudian diberi hak monopoli ekspor hasil alam seperti emas, kemenyan, kapur barus, damar, gaharu, rotan, sarang burung, madu, madu dan tanduk badak serta produk laut (Pelras, 2006: 372). Kisah orang Bugis Samarinda sarat dengan kisah keberhasilan ekonomi mereka di perantauan. Mereka memonopoli impor beras, garam, rempah-rempah, kopi, tembakau, opium, porselen, kain, besi, senjata api, sendawa (mesiu), dan budak. Selain Pua'Adu, mereka memiliki dewan yang terdiri atas beberapa orang nakhoda. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya aktivitas ekonomi mereka di perantauan. Bahkan kisah keberhasilan ini diwarnai dengan hak

untuk menguasai perdagangan di hulu sungai dan ditunjukkannya seorang Bugis menjadi syahbandar. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa akses ekonomi yang mudah tersebut didukung oleh ketergantungan penguasa setempat terhadap orang Bugis yang memasok senjata dan amunisi. Juga monopoli opium yang secara fisik dan psikologis mengakibatkan kecanduan (Pelras, 2006: 373)..

Di Kerajaan Banjar, seorang Bugis bernama Penna Dekke meminta izin dari sultan untuk menempati dan bermukim di wilayah Pamagatan. Sultan mengizinkan dengan syarat bahwa Penna Dekke harus mampu untuk menjaga perairan Muara pagatan yang sering didatangi oleh perompak. Periode selanjutnya memperlihatkan bahwa peran politik orang Bugis di kerajaan-kerajaan ini menguat. Terlepas dari hal tersebut, peran mereka dalam bidang ekonomi terus berlangsung melalui perdagangan hasil hutan dan eksplorasi tambang. Migrasi mereka di awal abad ke-20 karena penaklukan Bone dan Toraja merupakan sebab petani-petani Bugis dalam jumlah besar. Di Pagatan, mereka kemudian mengembangkan ketrampilan dan teknologi membuat perahu. Pendirian Pertambangan Batubara Pulau Lauttahun pada 1903 termasuk sebagai faktor penarik migrasi Bugis ke daerah tersebut. Bukan sebagai pekerja dalam perusahaan itu, orang-orang Bugis yang datang justru mengasah ketrampilannya sebagai pedagang perantara. Strategi adaptasi ekonomi orang Bugis berlanjut ketika menghadapi depresi ekonomi 1930an. Mereka mengusahakan sektor perikanan, bahuma dan pembuatan kopra. Gelombang migrasi pada periode ini, membuka lahan dengan meminta ijin tinggal-garap pada para *pambakala* atau kepala kampung. Sebagaimana yang dilakukan perantau Bugis di tempat lain, pada periode ini mereka menggarap kebun kelapa dan karet. Mereka juga memulai aktivitas ekonominya dengan kegiatan perikanan tangkap. Hubungan patron klien dalam aktivitas ekoomi mereka terlihat pada hubungan kalangan pengusaha (*pongawa*)

dengan pekerja atau anak buah (*sawi*) yang dalam masyarakat Bugis di Tanah Bumbu biasanya disebut *ajjoareng-joa'*. Seorang patron harus membangun dukungan klien dengan cara menunjukkan ke-dermawanan dan melindungi mereka (Mansyur, 2013: 75). Pola yang sama nantinya terlihat pada komunitas Bugis yang ada di Borneo Barat (lihat Bab III).

Aktivitas Ekonomi Orang Bugis di Jawa

Naluri ekonomi yang dimiliki orang-orang Bugis terhadap wilayah-wilayah potensial terlihat ketika mereka mendatangi Banten yang pernah menjadi pusat perdagangan yang mempertemukan para pedagang baik dari Barat maupun Timur.

Aktivitas Ekonomi Orang Bugis di Pulau Sumatra

Keberadaan komunitas Bugis yang besar yang berada di Pulau Sumatra tidak terlepas dari peran yang kuat dari para bangsawan Bugis dalam dinamika politik kerajaan-kerajaan di pulau tersebut. Namun di satu sisi, motif ekonomi tidak pernah terhapus dalam dinamika tersebut. Bugis muncul dalam persaingan perdagangan lada antara Kerajaan Palembang, Jambi dan Johor. Tersebutlah Daeng Mangika yang juga membantu Sultan Banten menyelesaikan persoalan politiknya. Setelah membantu Banten, Daeng Mangika tampil membantu Sultan Palembang dalam melindungi dari kemungkinan serangan Jambi. Ia dan para pengikutnya dari Banten menetap di wilayah perbatasan Palembang-Jambi.

Kehadiran komunitas Bugis di Bengkulu terkait dengan kepentingan ekonomi EIC (*English East Indian Company*) dalam mengawal perdagangan lada di sana. Untuk kepentingan tersebut maka

Inggris menunjuk seorang Kapitan Bugis. Orang Bugis pada awalnya digunakan oleh EIC sebagai tentara bayaran dan pengawas bagi orang-orang lokal dalam penanaman lada (Andaya, 1995: 129). Pada awal abad ke-19, Inggris bahkan memberikan jabatan menengah untuk orang Bugis dengan menunjuk beberapa orang Bugis untuk menjadi gubernur dengan tujuan menciptakan sebuah kelas dengan pemimpin lokal superior yang baru yang dapat memerintah dan taat (Andaya, 1995: 128). Namun pemimpin-pemimpin Bugis ini tidak diberi hak kepemilikan dan hanya diberi gaji sebagai wakil dari komunitasnya. Walaupun begitu, komunitas Bugis di Bengkulu selalu menganggap dirinya penjaga kepentingan EIC dan agen EIC dalam segala kepentingannya. Hubungan awal orang Bugis dan Inggris ini merupakan tonggak awal adaptasi orang-orang Bugis di wilayah barunya ini.

Aktivitas Ekonomi Orang Bugis di Semenanjung Malaka

Begitupun perantau Bugis yang datang ke tanah Melayu. Sejarah Kerajaan Johor dan Selangor mencatat bukti nyata keberadaan Bugis di wilayah ini. Daeng Mangika yang membantu Laksamana Johor yang kemudian membuka pintu bagi migrasi orang-orang Bugis di Johor. Perkampungan Bugis pertama berada di Klang, sebuah wilayah yang menyimpan deposit timah yang cukup banyak (Parani, 2015: 18). Walaupun berawal dari peran bangsawan Bugis yang terlibat kontrak politik dengan para penguasa Melayu, perantau Bugis lihai memainkan peran ekonominya melalui perdagangan di beberapa pelabuhan.

Proses migrasi besar orang Bugis serta pembukaan permukiman-nya di wilayah barat daya dan barat Johor terlihat pada masa Tumenggong Abu Bakar (yang kemudian menjadi Sultan Abu Bakar)

pada 1862. Hal ini terus berlanjut pada saat Sultan memberikan konsesi seluas 24.000 hektar kepada seorang pedagang Singapura keturunan Arab Hadrami bernama Sayid Mohammad Alsagoff (yang ibunya konon merupakan keturunan Gowa) untuk ditanami karet, gambir, sagu dan lada. Seorang kapten Bugis dari Siak membawa pekerja asal Jawa serta pedagang Bugis Wajo untuk menanam tanaman niga yang potensial di tempat tersebut. Keberhasilan mereka segera dikabarkan kepada family mereka yang telah menetap di Pontianak dan Jambi yang dengan segera datang untuk menangkap peluang tersebut (Pelras dalam Bakti, *ed*, 2010: 103). Di kemudian hari, orang-orang Bugis ini menguasai perkebunan dan perdagangan timah di Selangor. Kedudukan Daeng Marewa sebagai Raja Muda Johor menguatkan kedudukan orang Bugis di sana dengan mengangkat syahbandar. Pembukaan Singapura pada tahun 1819 turut menjadi sebab kedatangan orang Bugis di wilayah transito perdagangan tersebut..

Aktivitas Ekonomi Orang Bugis di Kerajaan-Kerajaan di sekitar Kesultanan Pontianak

Kesultanan Sambas di barat laut Kalimantan merupakan sebuah hegemoni yang masyur akan kegiatan perdagangan lautnya sampai awal abad ke-19. Hubungan para penguasa Sambas sebagai pedagang dengan orang-orang Bugis telah terjalin sejak lama. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dijalin Kesultanan Sambas dengan para pemilik dan nakhoda kapal Bugis. Sebagaimana contohnya hubungan yang dijalin oleh Pangeran Tumenggung dan Anakhoda Toneri dan Anakhoda Uwan Usup. Barang-barang dagangan yang dimiliki oleh pangeran Tumenggung dibawa oleh kedua nakhoda ini dengan kapal milik mereka untuk dijual di luar negeri. Hasil dari

penjualan barang tersebut akan digunakan oleh kedua nakhoda tersebut untuk membeli barang-barang yang akan dijual di Sambas. Selanjutnya barang dari luar negeri tersebut diserahkan pada pangeran Tumenggung untuk diperjualbelikan kepada penduduk Sambas baik di pesisir maupun pedalaman. Keuntungan besar yang diperoleh oleh kedua belah pihak turut dipengaruhi oleh Undang-Undang Pelayaran Bugis dan Undang-Undang Malaka yang antara lain memuat ketentuan bahwa antara pemilik barang dan pengangkut (pemilik kapal) akan mendapatkan pembagian keuntungan yang sama. Bagi para pengangkut, hasil yang telah dibagi dengan pemilik barang tersebut akan dibagi lagi yaitu untuk pemilik perahu, nakhoda dan anak buah kapal. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika para pelayar Bugis yang mula-mula berpendapatan kecil dapat menjadi kaya setelah beberapa kali melakukan kerjasama pelayaran (Ismail, 1985: 139-141). Hubungan kapal Bugis dari Wajo dan pesisir barat Kalimantan juga dicatat dalam sebuah teks anonim yang menuliskan bahwa pada awal abad ke-19 terdapat 20 perahu dagang wajo datang ke pelabuhan-pelabuhan di tempat tersebut. Selain melakukan kerjasama pengangkutan barang dagang, mereka juga membawa serbuk emas, sarang burung, madu, dan cangkang penyusut dari Kalimantan. Pontianak merupakan jalur kedua yang dilalui oleh perahu Bugis untuk menuju Singapura. Mereka menyusuri garis pantai Kalimantan menuju Pontianak pada bulan Oktober pada akhir musim, ketika angin bertiup paling kencang.

Berawal dari berkembangnya dinasti tertua di pantai barat, Sukadana, yang menjadi pengeksplorasi emas dan intan terbesar, menjadi kerajaan yang kuat di awal abad ke-17. Usaha pengamanan kegiatan politik dan perdagangan yang besar ini membuat Sukadana mulai memperkuat hubungannya dengan orang-orang Bugis. Bantuan militer yang diterima dari Empat Opu asal Luwu yaitu Opu Daeng Menambun, Opu Daeng Merewa, Opu Daeng Cellak, and Opu Daeng

Parani menciptakan jaringan diaspora yang kuat baik di pantai barat Kalimantan maupun Riau. Opu Daeng Menambon menjadi pemimpin di Mempawah, sedangkan Daeng Celak dan Daeng Merewa pergi di Riau dan diberi gelar Raja Muda di Johor. Adapun Daeng Parani tinggal di Siantan yang nantinya akan menjadi *meeting place* bagi pendatang-pendatang Bugis selanjutnya. Sedangkan Opu Daeng Kemasi menikah dengan adik dari Sultan sambahas dan mendapat gelar Pangeran Mangkubumi (Andaya, 1995: 127) Peristiwa beruntun ini membuat Sukadana menjadi bagian terpenting dari jaringan diaspora Bugis di Kalimantan dan segera berekspansi ke hampir seluruh pantai di Asia Tenggara (Atsushi, 2010: 72).

Sepanjang periode 1760-1770, Kerajaan Sukadana berhasil mengembangkan kegiatan-kegiatan komersial termasuk jaringan perdagangan dengan Riau. Saat itu Riau merupakan salah satu dari pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Riau menyediakan barang-barang dari Jawa, Borneo dan wilayah lainnya yang diminati oleh pedagang-pedagang Cina dan Inggris.⁶ Di bidang ini, pendatang Bugis memiliki peran penting sebagai tokoh utama dalam lalu lintas barang-barang dari belahan Asia Tenggara ke Riau. Di sinilah orang-orang Bugis memperkuat jaringannya antara Pelabuhan Sukadana dan Pelabuhan Riau.

Kalimantan Barat

⁶ Timah, lada, produk laut, beras yang tersedia di Riau berasal dari berbagai daerah di Asia Tenggara. Permintaan akan produk-produk di atas sangat tinggi terutama oleh pedagang Inggris yang membawa opium dan senjata. Adapun pedagang Cina memperdagangkan teh, keramik dan sutra (Atsushi, 2010: 73).

2. Keadaan Umum Wilayah Dan Masyarakat Pontianak

Keadaan dan Potensi Alam Pontianak

Pontianak, secara geografis berada di posisi yang strategis dalam jaringan perdagangan. Oleh karenanya Pontianak segera menjadi wilayah perdagangan yang ramai di pesisir barat Borneo setelah Kerajaan Sukadana. Posisinya yang berada di delta Sungai Kapuas dan Sungai Landak, menjadikannya sebagai pusat perdagangan yang strategis dimana kapal maupun perahu dari pedalaman dapat tertambat di situ. Pola pemusatan ekonomi terjadi ketika parit ataupun sungai-sungai kecil tersebut menjadi jalur transportasi utama bagi produk dari pedalaman untuk kemudian diperjualbelikan dalam perdagangan internasional di Pontianak.

Tanah dan cuaca di Pontianak mendukung tumbuh suburnya beberapa tanaman yang nantinya laku dijual di bursa tanaman niaga internasional. Sebut saja wilayah pantai di pesisir Pontianak yang menjadi wilayah terbaik berkembangnya kebun-kebun kelapa seperti wilayah Sungai Itik, Sungai Jeruju, Kalimas, Sungai Rengas dan Tanjung Saleh yang kesemuanya masuk dalam wilayah Sungai Kakap. Iklim pantai sangat baik untuk pertumbuhan pohon kelapa. Delta sungai biasanya berawa-rawa.

Lalu lintas pelayaran di sungai dapat dilihat dengan lalu lalangnya perahu berupa sampan kecil untuk lalu lintas lokal. Dalam sehari mereka dapat bertemu dengan kapal uap sebanyak tiga sampai 4 kali, juga perahu-perahu berukuran besar seperti tongkang, *bandong*, dan kapal derek. Lalu lintas sungai tetap menjadi yang paling utama sampai setidaknya awal abad ke-20 ketika pemerintah kolonial membangun jalan besar yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pelabuhan-pelabuhan yang sedang dikembangkan terutama Pontianak, Singkawang dan Pemangkat. Pembangunan jalan ini

berkaitan dengan berubahnya lahan di dekat pantai, sepanjang sungai dan daerah bukit menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Pembangunan jalan dilakukan dari Pontianak menuju Sambas, Sungai Pinyuh menuju Karangan, dari Mempawah menuju Sangking, dari Singkawang menuju Bengkayang dan dari Pemangkat menuju Sambas. Pada periode ini, pemerintah kolonial merasa bahwa ketertiban di wilayah Borneo Barat mulai tercipta dengan adanya penegakan hukum dan kehadiran tentara serta pasar yang sedang berkembang (Blink, 1919: 51).

Kondisi tanah di Pontianak pada umumnya sama. Kondisi tanah cukup labil karena merupakan tanah sedimentasi yang menghutan. Permukaan tanahnya yang merupakan bekas endapan hutan biasa disebut dengan tanah gambut atau *sepo*/*sepok*. Tanah gambut berada di atas tanah liat (yang biasanya merupakan tanah liat kuning). Begitupun pasir di pantai juga mengandung tanah liat (Blink, 1919: 14). Kondisi tanah semacam ini cocok untuk bertanam padi, jagung dan tebu. Untuk menjadikan tanah gambut sebagai lahan untuk pertanian maupun sebagai tempat tinggal maka diperlukan sistem saluran air yang berupa parit. Karenanya, untuk mengalirkan air diperlukan parit-parit atau yang kemudian disebut parit kongsi untuk mengelilingi perkebunan atau lahan lain yang nantinya akan menuju ke *verkeerparit* dan berakhir ke sungai. Tanah endapan dan lahan yang berdrainase baik cocok untuk permukiman dan budidaya tanaman perkebunan seperti kelapa, karet, pinang, kopi, buah-buahan dan lainnya. Keadaan tanah dan drainase ini juga cocok untuk lahan persawahan dan kebun sayur-sayuran. Kerusakan hanya akan timbul jika jika tanah ini tergenang air pasang dalam waktu yang cukup lama (Blink, 1919: 45).

Permukaan tanah berada beberapa meter di atas permukaan laut sehingga pengaruh pasang surut sangat besar (Alkadrie, 1984:

13). Di wilayah ibukota Pontianak perbedaan antara pasang dan surut hanya sekitar 2 kaki sedang di wilayah pesisir pantai sekitar 3 sampai 4 kaki (Blink, 1919: 44). Adapun keadaan cuaca di wilayah ini rata-rata memiliki suhu udara tinggi sepanjang tahun. Kelembaban nisbi rata-rata 85% dengan curah hujan rata-rata 3.200 mm. Oleh karenanya tidak ada perbedaan musim kemarau dan musim penghujan secara signifikan (Alkadrie, 1984: 15). Iklim dengan suhu terendah 19,9 derajat Celcius dan suhu tertinggi 34,1 derajat Celcius menyebabkan hanya jenis tertentu tanaman yang dapat tumbuh di sisi termasuk kelapa dan karet yang nantinya akan menjadi tanaman niaga yang dibudidayakan secara luas di Pontianak (Uljee dalam Listiana, 2013: 14).

Adapun jarak antara muara hingga pusat kota Pontianak sejauh 10 mil melewati Sungai Kapuas Kecil yang cukup dalam dan luas. Jalur sungai ini mampu dilewati kapal hingga kedalaman air 9-10 depa (Blink, 1919: 43). Sejak semula, Sultan Abdurrahman alkadrie sebagai pendiri Kerajaan Pontianak telah melihat peluang dan posisi sungai yang strategis ini sebagai faktor utama pendirian pusat pemerintahan dan perdagangan di wilayah ini. Dan dugaannya memang benar adanya. Jalur sungai ini menjadi jalur perdagangan yang berkembang pesat. Sungai Kapuas menjadi akses untuk perdagangan ke luar sedangkan Sungai Landak menjadi jalur kedatangan produk dari pedalaman yang merupakan produk utama perdagangan kala itu. Ketika pemerintah Hindia Belanda mulai menancapkan kekuasaannya di wilayah ini, Pelabuhan Pontianak, bersama dengan Pelabuhan Sukadana dan Pelabuhan Sambas difungsikan sebagai pelabuhan bebas. Posisi tiga pelabuhan ini dianggap pemerintah Hindia Belanda mampu menyaingi kehadiran Singapura milik Inggris yang sejak dibuka pada 1819 segera mengalihkan perhatian kapal-kapal dagang Tiongkok yang selama ini melayari Laut Jawa untuk memindahkan segala pusat kegiatannya ke Singapura.

Melalui *Resolutie Gouverneur Generaal* 18 Februari 1833 no.39, Pelabuhan Pontianak segera bebas dilayari untuk semua angkutan mulai 1 Januari 1834 (*Staatsblad* 1833 No. 8). Selanjutnya *Tarifwet* ditetapkan sebagai peraturan baru pada tanggal 13 Desember 1873. Pada saat itu mulai diberlakukan ketentuan bahwa dalam daerah tol (*tolgebied*) Hindia Belanda pelabuhan-pelabuhan yang dibuka untuk perdagangan umum. Pontianak menjadi salah satu pelabuhan yang dibuka untuk ekspor dan impor umum.⁷ Ketentuan ini segera diperbarui pada tahun 1882 melalui Ordonansi 1 Oktober 1882 yang memperbanyak jumlah pelabuhan ekspor impor (*Staatsblad* 1882 No. 240). Perubahan ini merupakan respon dari liberalisasi ekonomi dimana para pemodal asing mulai intensif melakukan investasi modal.

Berkaitan dengan pelabuhan, pelayaran antar pelabuhan diperkuat dengan jaringan perusahaan pelayaran seperti KPM (*Koninklijk Pakervaart Maatschappij*) dan Thong Ek yang berpusat di Pontianak. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kapal yang mampu membawa 1300 ton bruto. Sebelum kedua perusahaan layar tersebut, Kapal-kapal pribumi seperti Jawa, Madura, Belitung, Makassar, Palembang, Bali, Malaka, Siam, Pulau Pinang, Cina dan Inggris. Hingga pertengahan abad ke-19 pedagang lain yang singgah ke Pontianak berasal dari Eropa,

Singapura, Brunei, Banjarmasin, Riau, Tambelan dan Natuna. Selain itu para pedagang dari pantai timur Sumatera, Serawak dan Australia juga datang ke Pontianak untuk melakukan transaksi perdagangan. Pelabuhan Pontianak mempunyai bengkel apabila ada

⁷ Ketentuan ini membedakan pelabuhan menjadi dua yaitu (1) pelabuhan untuk ekspor dan impor umum dan (2) pelabuhan untuk impor terbatas dan ekspor umum. Selain Pontianak pelabuhan yang serupa ada di Batavia, Semarang, Surabaya, Cirebon, Pasuruan Cilacap. Untuk Sumatera adalah Padang, Sibolga, Baros, Singkel, Palembang, Muara Kumpeh, Muntok. Banjarmasin dan Pemangkat (Rahmayani, 2015: 80).

kapal-kapal yang mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Bengkel atau tempat perbaikan kapal-kapal tersebut berada di wilayah yang dekat dengan Pelabuhan Pontianak, yaitu di Kampung Siantan, Baroe, Ilir dan Djawi. Tempat-tempat ini juga menerima pesanan untuk membangun dan membetulkan perahu-perahu baik itu perahu dengan dayung maupun perahu dengan mesin uap. Kebanyakan perahu yang dibuat adalah bandong, bidar, boeang (Sandick, 1919: 204). Pelabuhan Pontianak juga pernah mengekspor minyak kelapa dan kopra ke Jawa dengan jumlah 6600 ton dan 2,7 milion liter minyak dan mempunyai hubungan perdagangan yang baik dengan .Singapura (Rahmayani, 2015: 96).

Penduduk

Penduduk Pontianak yang dikategorikan sebagai *inlandsche bevolking* adalah Dayak Melayu dan Bugis. Pada awal abad ke-20 ketika permukiman orang-orang Madura muncul di pesisir maka orang Madurapun masuk dalam kategori ini. (MvO Th H.J van Driessche 1913:47).

Secara fisik, laki-laki Bugis berbadan tegap, agak kurus dan berotot pada lengannya sedangkan perempuan Bugis berwajah cantik, berkulit terang seperti pada orang-orang Melayu pada umumnya (*Encyclopedie van Nederlandsch Indie* hlm 324-331).

Rumah orang Bugis di wilayah Pontianak tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah mereka di daerah asal mereka di Pulau Sulawesi. Rumah orang Bugis terbuat dari kayu atau bambu. Demikian pula dengan kebiasaan mereka menanam berbagai pohon seperti kelapa, mangga atau buah-buahan lain (*Encyclopedie van Nederlandsch Indie* hlm 324-331). Orang Bugis sering menyimpan uangnya kembali ke asalnya (MvO Th H.J van Driessche 1913:47).

Tabel 1
Jumlah Penduduk Bugis di Pontianak

Tahun	Orang Bugis	Total
1814	1.000	-
1824	1.814	9567
1829	1.814	22523*
1838	1.500	4722
1839	2.000	6023
1877	9.000	
1901	16.047	47.023

Ket: *total penduduk mencakup pula penduduk Mandor. Jika pada tahun 1824 penduduk Mandor berjumlah 10232 maka bertumpu pada selisih perkiraan tersebut, total penduduk Pontianak tanpa penduduk Mandor berjumlah sekitar 12291 jiwa.

(Sumber: Leyden, 1814: 48; Algemeene Verslag, 1824; Algemeene Verslag, 1829; Algemeene Verslag, 1838; Algemeene Verslag 1839; Algemeene Verslag, 1877; Enthoven, 1903: 852-858).

3. Jaringan Awal Orang Bugis di Pontianak

Orang Bugis sejatinya merupakan petani. Pendapat ini kemudian menjadi perdebatan yang seru antara para ahli dan juga masyarakat yang telah lama beranggapan bahwa Bugis adalah pelaut. Sedemikian banyak tulisan yang menghubungkan orang Bugis dengan aktivitas perompakan di perairan Nusantara. Bahkan Vlekke menyatakan bahwa armada perompak Bugis merambah seluruh kepulauan di Indonesia. Mereka menetap kuat di dekat Samarinda di Kesultanan Kutai, menolong sultan-sultan di pantai barat Kalimantan dalam konflik-konflik internal mereka dan menyusup ke Kesultanan Johor serta mengancam Belanda di benteng Malaka (Vlekke, 2008: 230). Namun Pelras menyatakan bahwa teknologi pelayaran Bugis merupakan sejarah baru bagi kelompok Bugis. Secara singkat Zuhdi menyatakan bahwa perkembangan kemaritiman Bugis (terutama

dari Wajo), yang tentu berkaitan dengan proses migrasi mereka, berkaitan dengan beberapa hal. Pertama adalah kejatuhan Pelabuhan Malaka di tangan Portugis pada abad ke-16 membuat Pelabuhan Makassar semakin berkembang sehingga pada abad ke-17 orang Makassar dan Bugis terlihat sebagai kelompok yang menonjol dalam perdagangan maritim. Kedua, pengetahuan maritim mereka berkembang pada abad 17-18, hampir bersamaan dengan masa ketika kemaritiman Jawa memudar. Ketiga, jatuhnya Makassar ke tangan VOC pada 1669 mendorong gelombang migrasi orang-orang Bugis ke barat. Dan selanjutnya adalah kekacauan yang disebabkan oleh pendudukan VOC atas Wajo (Zuhdi, 2014: 93-96).

Terlepas dari pendapat di atas, jelas bahwa embrio jaringan Bugis di pantai barat Kalimantan lebih dekat kaitannya dengan proses kemaritiman yang dibangunnya. Sejarah Kerajaan Sukadana yang telah dikemukakan di atas menjadi pembuka jaringan orang-orang Bugis di Kerajaan Pontianak. Orang Bugis mewarnai perpindahan kekuatan ekonomi di pantai Barat, dari Kerajaan Sukadana beralih ke Kerajaan Pontianak. Dimulai dengan Abdurrahman Alkadrie putra dari Syarif Husein bin Ahmad Alkadrie, seorang mufti Kerajaan Mempawah yang berasal dari Yaman, yang membuka wilayah strategis di pinggir Sungai Kapuas pada tahun 1771. Nuansa Bugis mulai terlihat ketika ia dianugerahi dengan gelar sultan oleh Raja Haji dari Johor yang merupakan keturunan Bugis. Raja Haji pula yang memberikan bantuan militer padanya saat menaklukkan Kerajaan Sanggau. Pengaruh orang Bugis dalam bidang militer di masa awal berdirinya Kerajaan Pontianak terlihat ketika Syarif Kasim Alkadrie (ketika itu merupakan putra mahkota) dan pasukan VOC menyerang Sukadana 1786. Setidaknya ada 400 orang Bugis yang ikut dalam kapal perang Syarif Kasim (Atshusi, 2010:78).

Orang Bugis segera mengambil bagian ketika Pontianak mulai melampaui peran Sukadana sebagai pelabuhan utama di pesisir barat Kalimantan. Jaringan Bugis mendominasi pengumpulan produk dari pedalaman termasuk intan dari Landak. Orang Bugis juga mencoba memasuki jaringan perdagangan emas dengan membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari tawaran pedagang perantara lainnya, walaupun pedagang perantara emas yang utama tetap diduduki oleh orang-orang Cina (Atsushi, 2010:74).⁸

Syarif Abdul Rahman mengharuskan para pedagang Landak, Sanggau, dan dari daerah pedalaman lainnya untuk melalui Pontianak. Ia juga mengakuisisi para pedagang tersebut sebagai pemukim baru di wilayah Pontianak dengan timbal balik perlindungan terhadap lanun. Para pedagang yang kerap bekerjasama dengan Syarif Abdul Rahman adalah pedagang Bugis dan Cina dari Mempawah, Sambas, pelabuhan Melayu lainnya (Leyden, 1814: 38).

Pemukim baru tersebut kemudian berada di bawah otoritas Kesultanan. Mereka diwajibkan untuk selalu siap dan mau untuk menjadi serdadu dalam perang yang dijalankan oleh Sultan.⁹

Pada masa Syarif Abdul Rahman pedagang Bugis disebut sebagai penghutang terbesar baginya. Kebutuhan akan kehadiran pedagang tersebut dibutuhkan sehingga hutang-hutang tersebut tidak dipersoalkan. Ketenteraman aktivitas dagang para pedagang Bugis di Pontianak juga dijaga oleh Syarif Abdul Rahman yang ditunjukkan

⁸ Namun pengaruh Bugis dari Mempawah dalam perdagangan emas juga diduga merupakan salah satu penyebab penurunan perdagangan di Pontianak pada tahun 1779 selain memang ketidakmampuan Sultan dalam memaksakan pajak dari para pedagang (Van Goor dalam Atsushi, 2010: 76).

⁹ Seluruh penduduk Kesultanan diwajibkan untuk ikut perang, termasuk penduduk Melayu dan Bugis, begitu pula orang-orang Cina yang wajib membantu dalam situasi darurat. Akan tetapi orang Melayu ditempatkan sedikit karena tidak ada kepercayaan diri. Leyden. 1814. "Sketch of Borneo," dalam *Verhandelingen van het Genootschap van Kunsten Wetenschappen* 7.

oleh sikapnya dengan tidak mengabdikan permintaan para saudagar Cina untuk memborongkan pengurusan pelabuhan terhadap mereka karena dikhawatirkannya akan menimbulkan bertikai dengan pedagang Bugis. Akan tetapi pada masa Syarif Kasim, pedagang Bugis dipaksa untuk membayar biaya pada petugas pelabuhan. Usaha Syarif Kasim ini tidak berhasil kecuali menyebabkan penurunan jumlah kedatangan para pedagang Bugis (Leyden, 1814: 45-47; Veth I, 2012: 328).

Penyelundupan pada masa Syarif Kasim dikabarkan meningkat yang dilakukan oleh orang-orang Bugis. Peningkatan tersebut diduga terkait dengan perlakuan tegas Syarif Kasim dalam menerapkan pajak impor terhadap pedagang-pedagang Bugis (Veth I, 2012: 333). Perahu-perahu Bugis menjadi pembawa komoditas terbanyak pada awal abad ke-19, tetapi mereka tidak mau diperiksa sehingga sulit dihitung (Veth I, 2012: 332).

4. Orang Bugis di Pontianak dalam Pandangan Kolonial dan Kesultanan Pontianak

Pemerintah kolonial memiliki pandangan yang positif terhadap masyarakat Bugis. Catatan kolonial membuktikan bahwa mereka adalah kelompok yang jarang bermasalah dengan pemerintah kolonial. Mutinghe mencatat bahwa kelompok ini memiliki sifat sabar, hemat dan berperilaku baik (Memorie van Mr H W Mutinghe 1821 dalam Sandick dan Marle, 1919: 19). Kepala orang-orang Bugis disebut oleh pejabat kolonial sebagai pedagang asing paling makmur di Pontianak selain orang-orang Arab. Perdagangan di seluruh Kapuas dulu berada di tangan mereka walau di pertengahan abad ke-19

peran mereka berkurang walau mereka menandingi perdagangan ke Singapura dan Jawa.¹⁰

Tanah-tanah di pinggiran Pontianak dibuka oleh orang-orang Melayu dan Bugis yang datang dipimpin oleh pemimpin mereka sendiri. Pada umumnya mereka datang dipimpin oleh nakhoda-nakhoda.¹¹ Mereka ini datang dengan tanpa mengikatkan diri kepada Sultan Pontianak secara ekonomi dan sosial. Namun mereka menghormati Kesultanan sebagai pemilik tanah sebelumnya. Walaupun kepala-kepala kampung Bugis dipilih oleh mereka sendiri namun Sultan merupakan orang yang menetapkannya. Para kepala kampungpun sering beraudiensi dengan Sultan terkait dengan kepentingan-kepentingannya. Penghormatan mereka terhadap sultan terkait pula dengan konsep religious dimana sultan merupakan keturunan nabi. Begitupula dengan pandangan bahwa tanah yang mereka tempati ini memiliki hubungan magis dengan Sultan sehingga subur tidaknya tanah terkait dengan bagaimanakah hubungan mereka dengan sultan (Yeri, 2016: 372-373).

Pada awal abad-20 setidaknya terdapat 14 kampung di Sungai Kakap, sebuah wilayah di Kesultanan Pontianak yang mayoritas adalah pemukim Bugis. Mereka dipimpin oleh metua yang diangkat sultan. Metua dipilih oleh warga kampung dan demang. Metua biasanya, walaupun tidak mutlak, merupakan keturunan dari pendiri kampung. Jabatan metua tidak diwarisi namun jika ia meninggal diprioritaskan anak-laki-laki atau adik-adiknya diprioritaskan untuk menggantikan (Yeri, 2016: 372-373). Metua memiliki tugas menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan pelanggaran kecil.

¹⁰ ANRI. Inventaris Arsip BW No. 61, Politieke Verslag, 1856.

¹¹ Adatrechtbundel diterjemahkan oleh pastur Yeri dalam Kumpulan Catatan & Tulisan Adat-Istiadat dll, Kalbar 1706-1950

Di daerah Peniti yang juga dihuni oleh orang Bugis dari Wajo' dikepalai oleh *wedono*. Setara dengan kepala distrik, *wedono* membawahi kelapa kampung. Gelar berbeda terdapat di Sungai Kakap. Kepala pemerintahan disebut *boepati indra*, yang membawahi *pënggawa* yang bertanggungjawab atas kepala-kepala kampung bergelar *matoewa* (Enthoven, 1903: 851).

Gelar *pënggawa* (*pangauwa* atau *punggawa* atau *pongawa*) sudah dikenal sejak masa awal keberadaan komunitas Bugis di Pontianak. Komisaris E.A. Francis menjelaskan bahwa komunitas Bugis tahun 1830an telah memiliki pemimpin dari kelompok etnis sendiri dengan gelar tersebut (E.A. Francis, 1838: 18-19). Adapun *matoewa* atau *matoa* yang secara harfiah dalam bahasa Wajo berarti tua atau orang tua adalah gelar kepala kampung (*wanua* atau *bori*) bagi etnis Bugis dan Makassar. Bagi komunitas Wajo gelar *matoa* juga dikenakan oleh pemimpin komunitas pedagang (lihat artikel J. Noorduyn "The Wajorese merchants' community in Makassar" cf. Anwar Thosibo, 2002: 46).

Kepala orang-orang Bugis diketahui telah mendukung Syarif Abubakar Alkadri, putera Sultan Pontianak Kedua, untuk menduduki tahta Kesultanan setelah kematian ayahnya. Dukungan tersebut diduga oleh pejabat kolonial disebabkan oleh latar belakang ibu Syarif Abubakar yang berdarah Bugis. Orang-orang Bugis di awal abad ke-19 masih menjadi momok menakutkan bagi pemerintah kolonial, seperti yang ketakutan atas serangan saat ada pertentangan suksesi Sultan Pontianak ketiga (Veth, 1856: 58).

Orang-orang Bugis terkemuka tinggal di sekitar kediaman Sultan, yang pada tahun 1856 diperkirakan berjumlah 1.500 jiwa. Pada pertengahan abad ke-19 kepala komunitas Bugis yang paling terkemuka antara lain Said Abu Bakar dan Nakhoda Adam. Kedua orang kepala Bugis tersebut sangat banyak terlibat dalam pemerintahan

(Politieke Verslag, 1856). Orang Bugis (dan Melayu) pada masa awal abad ke-19 (entah sampai kapan aturan ini berlaku) dikenakan wajib ikut perang jika dipanggil oleh pihak Kesultanan (Veth I, 2012: 330). Sebuah kampung Bugis di tahun 1829 memiliki pasar dengan kegiatan perdagangan kecil yang merupakan salah satu dari dua kampung Cina yang juga memiliki aktivitas perdagangan (*Algemeene Verslag*. 1829/ BW. 5/6).

5. Permukiman Komunitas Bugis di Pontianak

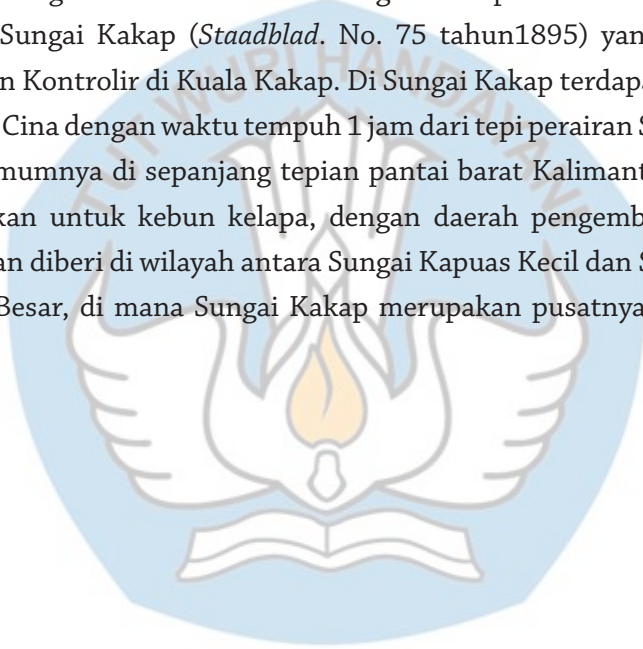
Pendatang Bugis (selain Cina dan Banjar) pada tahun 1829 diberitakan datang hingga beberapa ribu orang. Pendatang tersebut dinilai pejabat kolonial dibutuhkan untuk memajukan daerah hulu (pedalaman Kalimantan Barat) (*Algemeene Verslag* 1890. Inventaris Arsip BW 37). Keseluruhan kehidupan mereka terpisah dari kelompok etnis lain, karakteristik mereka sendiri adalah alat pelengkap dan kebiasaan [yang dinilai pejabat kolonial berasal] dari tanah kelahiran mereka, tetapi juga dipandang pejabat kolonial akan menarik kedatangan pendatang baru dari daerah asal mereka. Kebiasaan yang dianggap buruk oleh pejabat kolonial dari pendatang Bugis adalah keinginan untuk kembali ke rumah dan mereka tidak memiliki ikatan pernikahan dengan keluarga raja sehingga belum terdapat seorangpun dari kelompok migran Bugis ini yang mendapatkan otoritas (*Algemeene Verslag* 1829, BW No. 5/6).

Pada laporan umum tahun 1824 di antara 14 permukiman yang ada di wilayah Kesultanan Pontianak terdapat sebuah kampung yang dihuni hanya oleh orang Bugis dengan nama Kampung Bugis. Kampung dengan total penduduk 1814 jiwa ini menjadi kampung dengan penduduk terpadat di Pontianak (*Algemeene Verslag*, 1824).

Keberadaan orang Bugis telah ada sejak perang antara Sultan Sukadana Zainuddin dengan tuannya, Sultan Banten [yang dimintai bantuan oleh puteri penguasa Landak] yang dibantu oleh VOC pada 1699, sehingga ia terusir dari Kerajaannya dan kemudian mencari perlindungan ke Banjarmasin dan kembali lagi setelah mendapat bantuan pasukan Bugis bawahan Opu Daeng Menambon. Opu kemudian menikah dengan puteri Sultan Sukadana di Kotawaringin setelah menyelamatkan kekalahan sebelumnya untuk penahanan yang akan datang, terkait dengan Kerajaan Mempawah dan opu berhasil memulihkan tahta ayah tirinya di Sukadana pada ekspedisi kedua. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dari Sukadana ke Mempawah sembari mendirikan permukiman Bugis pertama di Pantai Barat Kalimantan saat itu dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 orang. Permukiman ini tentunya berkembang, dan termasuk permukiman Bugis di Pontianak yang sudah besar di tahun 1819. Perkembangan ini (menurut kalangan Bugis sendiri) sudah seharusnya menjadi perhatian. Karena kemudian jumlah mereka berkembang pesat pada kurun tahun 1819 hingga 1825 ketika perang antara Belanda dengan orang-orang Cina di Monterado dan Mandor. Begitu pula Mempawah yang berulang kali mengalami pertempuran, sebagian dari mereka yang berlaga adalah orang-orang Bugis yang menerima kompensasi sebidang tanah yang terletak di sepanjang garis luar perairan Sungai Pontianak, yang kemudian dikenal dengan nama Sungai Kakap (Anonim, 1871: 43-44).

Orang-orang Bugis tersebut berada di bawah otoritas Sultan oleh karena itu pula mereka harus membantu Sultan dalam peperangan. Menurut E.A. Francis berdasarkan keadaan tahun 1832, orang-orang Bugis yang berada di pantai ini kebanyakan adalah orang Wajo dari Sulawesi. Mereka dipandang sebagai pribumi yang rajin di pantai barat Kalimantan (E.A. Francis, 1838: 18).

Sungai Kakap sendiri, yang disebut-sebut merupakan permukiman Bugis terbesar di Kesultanan Pontianak adalah daerah pesisir pantai *Onderafdeeling* Pontianak di *Afdeeling* Pontianak, Keresidenan *Westerafdeeling van Borneo*. Dulu Sungai Kakap adalah ibukota *Afdeeling* Sungai Kakap (*Staadblad*. No. 75 tahun 1895) yang berkedudukan Kontrolir di Kuala Kakap. Di Sungai Kakap terdapat permukiman Cina dengan waktu tempuh 1 jam dari tepi perairan Sungai Kakap. Umumnya di sepanjang tepian pantai barat Kalimantan dikembangkan untuk kebun kelapa, dengan daerah pengembangan penanaman diberi di wilayah antara Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Punggur Besar, di mana Sungai Kakap merupakan pusatnya (ENI: 27).



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



III
AKTIVITAS EKONOMI KOMUNITAS BUGIS
DI KESULTANAN PONTIANAK PADA PARUH
KEDUA ABAD KE-19
Dana Listiana

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan kondisi penduduk Pontianak khususnya komunitas Bugis dan persebaran permukiman mereka. Adapun bagian ini akan mengulas selintas aktivitas ekonomi komunitas Bugis yang mula-mula mendiami wilayah Pontianak. Akan tetapi fokus utama bab ini untuk membahas siapakah orang-orang Bugis yang datang pada paruh kedua abad ke-19, mengapa mereka datang ke Pontianak, dan bagaimana mereka datang dan dapat bertahan hidup di Pontianak pada periode tersebut.

1. Aktivitas Ekonomi Migran Bugis Pendahulu

Orang Bugis sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya telah menjadi salah satu unsur penduduk Pontianak sejak masa sultan pertama Pontianak, Syarif Abdul Rahman Alkadrie. Penggunaan orang Bugis sebagai serdadu perang sudah berlangsung sejak masa Sultan Syarif Abdul Rahman di akhir abad ke-18. Empat ratus

orang Bugis dikerahkan bersama sejumlah tentara Melayu dipimpin oleh putera Sultan, Syarif Kasim bersama VOC menyerang Sukadana tahun 1786 (Leyden, 1814: 27-28).

Orang-orang Bugis dari kalangan serdadu ini dinyatakan oleh pejabat kolonial telah membentuk permukiman yang besar di tahun 1819. Permukiman tersebut dinyatakan terkait dengan kelompok pengikut Opu Daeng Menambon yang mengembangkan permukiman Bugis di Mempawah setelah terlibat dalam suksesi takhta Sukadana pada akhir abad ke-17 hingga abad ke-18 (Anonim, 1871: 43).¹²

Jumlah orang Bugis semakin berkembang dalam kurun tahun 1819 hingga 1825 ketika perang antara pemerintah kolonial dengan orang-orang Cina di Monterado dan Mandor, begitu pula dengan Mempawah. Sebagian dari mereka menerima kompensasi sebidang tanah yang terletak di sepanjang garis luar perairan Pontianak. Daerah ini kemudian dikenal dengan nama Sungai Kakap (Anonim, 1871: 43-44).

Selain serdadu, pedagang Bugis adalah kelompok yang telah datang pada masa awal Kesultanan Pontianak, bahkan dikenal membawa barang dagang terbanyak (Veth I, 2012: 332). Kelompok pedagang Bugis tidak saja datang langsung dari Sulawesi, melainkan pula dari Mempawah, Sambas, dan dari kota pelabuhan lainnya.

¹² Keberadaan orang Bugis telah ada sejak perang antara Sultan Sukadana Zainuddin dengan tuannya, Sultan Banten [yang dimintai bantuan oleh puteri penguasa Landak] yang dibantu oleh VOC pada 1699, sehingga ia terusir dari Kerajaannya dan kemudian mencari perlindungan ke Banjarmasin dan kembali lagi setelah mendapat bantuan pasukan Bugis bawahan Opu Daeng Menambon. Opu kemudian menikah dengan puteri Sultan Sukadana di Kotawaringin setelah menyelamatkan kekalahan sebelumnya untuk penahanan yang akan datang, terkait dengan Kerajaan Mempawah dan Opu berhasil memulihkan tahta ayah tirinya di Sukadana pada ekspedisi kedua. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dari Sukadana ke Mempawah sembari mendirikan permukiman Bugis pertama di Pantai Barat Kalimantan saat itu dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 orang. Permukiman ini tentunya berkembang, dan termasuk permukiman Bugis di Pontianak yang sudah besar di tahun 1819 (Anonim, 1871: 43).

Mereka kerap diakuisisi sebagai penduduk oleh Syarif Abdul Rahman dengan tawaran timbal balik berupa perlindungan terhadap lanun. Mereka berdagang di bawah pimpinan kalangan mereka sendiri (Leyden, 1814: 38; 50).

Pada awal abad ke-19, pedagang Bugis juga pedagang Melayu dan Arab menjangkau perdagangan di pedalaman Kalimantan (Leyden, 1814: 54). Karakter mereka dinilai oleh pejabat kolonial mampu menguasai perdagangan terutama dari hasil penanaman mereka. Mereka dinilai tidak mengenal lelah untuk mendapatkan keuntungan bahkan yang berada di luar jangkauan mereka. Etos ini yang menurut pejabat kolonial tersebut membuat orang Bugis dapat menempati posisi sebagai pedagang terkaya di Kesultanan Pontianak kala itu (*Algemeene Verslag*, 1829). Hingga medio abad ke-19 migran Bugis masih termasyur dalam kegiatan perdagangan hingga pejabat komisararis pun mengusulkan kepada pemerintah kolonial untuk menjalin perdagangan dengan orang Bugis, selain Melayu (Veth, 1856: 79-82)¹³. Jumlah kekayaan sejumlah orang Bugis pada awal abad ke-19 dikabarkan sangat besar mencapai lebih dari 100.000 dollar (Leyden, 1814: 54).¹⁴

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

¹³ Mengenai aktivitas orang Bugis di bidang perdagangan terutama dengan penduduk Cina dan penduduk di daerah hulu juga disebut oleh D.J.van den Dungen Gronovious dalam laporannya. Kehadiran mereka diterima dan ditempatkan dengan baik oleh pemerintah. Gronovious dalam P.J.Veth. 1871. "Verslag Over de Residentie Borneo;s West Kust, 1827-1829," dalam *TNI I*, 1871. Zaltbommel: Joh. Noman en Zoon. Hlm. 17-18.

¹⁴ Perdagangan sebelum pertengahan abad ke-19 didominasi aktivitas perdagangan di Sungai Kapuas yang ditangani oleh pedagang Bugis, namun setelah itu didominasi oleh perdagangan dengan Singapura dan Jawa yang ditangani oleh pedagang Cina. Kesejahteraan mereka disetarakan dengan kesejahteraan para pedagang Arab dan Timur Asing lainnya. Koloni orang Bugis di pertengahan abad ke-19 ini diberitakan pejabat kolonial lebih banyak menangani pertanian meski perdagangan masih memberi keuntungan lebih banyak. Selain pedagang, kesejahteraan juga diperoleh oleh kepala-kepala Bugis setidaknya hingga pelaporan pejabat kolonial pada pertengahan abad ke-19 (ANRI. Inventaris BW. No. 61, *Politieke Verslag*, 1856).

Selain dari perdagangan, kekayaan mereka dikenal melalui pembungaan pinjaman uang (E.A. Francis, 1838: 19). Pengkreditan ini dilakukan oleh orang-orang Bugis yang telah memiliki dan mengelola tanah sendiri (*Algemeene Verslag*, 1829). Orang Bugis juga dikenal dengan kemahiran membuat kain Bugis dan membuat baju dari bahan sutera (Leyden, 1814: 50; 54).

Orang-orang Bugis pada awal abad ke-19 sebenarnya diberi izin oleh Sultan untuk bercocok tanam pada lahan seluas-luasnya. Akan tetapi kala itu jarang dari mereka yang mengambil kesempatan tersebut (Leyden, 1814: 50).¹⁵

Orang-orang Bugis yang pada umumnya datang dari Tanah Bugis dalam keadaan miskin relatif cepat memperoleh kekayaan dari gaya hidup hemat dan ketangkasan dalam perdagangan. Mereka bahkan dinilai oleh Leyden sangat ekonomis dan bahkan kikir dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai gambaran, pengeluaran sebuah keluarga Bugis per hari berjumlah sekitar 1/4 dari pengeluaran satu orang Cina. Keluarga Bugis menggunakan uang tidak lebih dari 3 hingga 4 *wang* ketika orang-orang Cina dapat menghabiskan satu *rupee* per hari. Sementara 1 *wang* Pontianak hanya 12 bagian dari satu *rupee* (Leyden, 1814: 50). Suatu gaya hidup untuk bertahan hidup yang berlaku setidaknya bahkan hingga akhir abad ke-19. Karena pada tahun 1890 pejabat kolonial masih melaporkan gaya hidup orang-orang Bugis yang hemat, rajin menabung, dan melakukan pekerjaan sampingan (*Algemeene Verslag*, 1890).

¹⁵ Izin ini juga diberikan Sultan pada budak-budak domestik sebatas untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Leyden, 1814: 50).

2. Migran Baru Bugis

Kedatangan *Pandeling* Bugis

Pada pertengahan abad ke-19 Pontianak kedatangan migran Bugis dalam jumlah besar. Selanjutnya, secara periodik ratusan orang Bugis datang dan didatangkan ke Pontianak setiap tahun. Upaya mendatangkan mereka terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa oleh Sultan Pontianak (Enthoven, 1903: 852-853).

Lokasi awal pengembangan perkebunan kelapa di Sungai Kakap adalah tujuan pertama penempatan mereka. Walau Sungai Kakap telah dibuka sejak awal abad ke-19 oleh imigran Bugis pendahulu dan orang-orang Melayu penghutang berstatus *orang boedak* dan *anak mas* (*pandeling*, dalam istilah hukum pemerintah kolonial) atas perintah Sultan, tanah yang belum tergarap pada tahun 1850 masih sangat luas (Enthoven, 1903: 852-853; Anonim, 1871: 47).

Pendatang Bugis terbesar di Pontianak sejak awal abad ke-19 adalah orang Wajo (E.A. Francis, 1838: 18). Orang Pare-Pare dan Palopo juga disebut sebagai kelompok Bugis yang datang di periode selanjutnya, meski orang Wajo atau Towajo masih menjadi pendatang terbanyak sepanjang abad ke-19 (Anonim, 1871: 47; Anwar Thosibo, 2002: 138; dan Gene Amarell, 2002: 58).

Berbeda dengan migran Bugis sebelumnya di periode paruh kedua abad ke-19 dinilai Willer, pejabat kolonial yang pernah menjabat sebagai residen, lebih berpengaruh pada pengembangan permukiman Bugis yang lebih luas. Hal ini ditunjukkan oleh kedatangan migran Bugis secara terus menerus, terutama sejak tahun 1852-1853 (Anonim, 1871: 47). Proses mendatangkan yang semula seperti praktik uji coba yang diinisiasi oleh kerabat Sultan telah menunjukkan hasil sehingga merangsang para pemilik modal lain, seperti para syarif, para said, dan

para haji untuk membuka perkebunan kelapa dengan mendatangkan migran Bugis yang dinyatakan J.J.K. Enthoven sebagai *pandeling* tersembunyi (Enthoven, 1903: 853). Permukiman Bugis di pantai Pontianak tersebut juga dinyatakan sangat berhubungan dengan praktik sistem *pandeling* oleh Wijnen, seorang pejabat kolonial yang pernah bertugas di Pontianak. Begitu besarnya praktik *pandeling*, yang disebut sebagai bentuk samaran dari perbudakan agar tidak menyalahi hukum, adalah dasar pernyataannya tersebut (Wijnen, 1871: 314)

*Pandeling*¹⁶ disebut dalam terminologi hukum kolonial pada tahun 1818. Berdasarkan peraturan penghapusan praktik perbudakan dan *pandeling* di Hindia Belanda tersebut *pandeling* dapat dimaknai sebagai orang yang dijamin oleh sejumlah uang pinjaman melalui suatu kontrak, seperti kutipan berikut: “*het geven of nemen van verpandelingen ter verzekering van eenige geldelijke schuld of aangeane verbintenissen, wordt in geheel Ned. Indie afgeschaft.*” Terlepas dari maksud pasal 112 tersebut—karena penghapusan *pandeling* untuk wilayah di luar Jawa dan Madura pun kemudian dikoreksi dan dinyatakan akan dihapuskan secara bertahap karena pembangunan negara kolonial membutuhkan penduduk di negeri-negeri luar (*buitenlanden*)—kita

¹⁶ Orang Bugis dapat dibagi antara keturunan raja dan bangsawan lainnya, kelas pekerja biasa, bekas budak, dan *pandeling*. Perbudakan sekarang juga secara resmi telah dihapuskan di Lanskap Pemerintah Otonom (*zelfbestuurendlandschap*). Budak telah dikonversi dalam *pandelingen* sehingga hasilnya adalah perbudakan dan *pandelingenschap* yang keduanya dapat dihapuskan secara hukum, tapi tidak usah dikatakan bahwa, di mana mereka telah ada menurut tradisi di Tanah Bugis, mereka belum keluar dari kehidupan leluhurnya. Hal itu akan memakan waktu bagi mereka melalui pengaruh perkembangan masyarakat akan dihapus di Tanah Gubernemen perbudakan melalui lembaran negara Sb. 1875 No. 140, 287 masih diperkenalkan, tetapi peraturan ini memiliki ruang lingkup untuk membatasinya dengan menerapkan pendaftaran, di mana budak harus terdaftar dan oleh ketentuan, anak mereka setelah didaftar lahir dari seorang budak, akan bebas ketika transisi dari budak hanya bisa dilakukan oleh suksesi dan kecuali melalui penjualan. Setelah menjumlah budak terdaftar yang meninggal, dijual bebas, pelepasan dan melarikan diri secara signifikan berkurang melalui surat keputusan pemerintah 3 Oktober 1905 no.12 untuk secara keseluruhan penjualan bebas dari jumlah budak yang tersisa tidak signifikan (ENI: 326).

dapat memahami konsep *pandeling* yang disampaikan pemerintah kolonial (Kater, 1871: 296). *Pandeling* menjadi kelas sosial terendah pada masyarakat Bugis hasil dari peraturan hukum kolonial sebab merupakan konversi dari budak dengan sejumlah utang bernilai sama dengan harga beli dari orang yang bersangkutan. Semua *pandeling* berdasarkan *Staatblad* tahun 1875 No. 140, 287 seharusnya terdaftar dan akan dinilai dari pekerjaan mereka untuk kepentingan tuan mereka, dengan ketentuan pada saat mendaftar tersisa utang pokok bulanan dengan jumlah taksiran dapat dipertimbangkan untuk dikurangi (ENI: 326).

Praktik *pandeling* sepertinya dapat disamakan dengan yang Pelras katakan sebagai “budak karena utang” di Sulawesi Selatan. Mereka dapat bebas setelah melunasi utangnya. Akan tetapi mereka tidak memiliki hak dan kemerdekaan untuk berpindah tuan sebagaimana “pengikut”. “Budak utang” akan dikejar jika melarikan diri dan dapat jual ke tuan lain (Pelras, 2002: 403).

Berdasarkan penelitian Anwar Thosibo, istilah *pandeling* yang diperkenalkan pemerintah kolonial pada awal abad ke-19 dimaknai sebagai “orang jaminan” menjadi cara umum di Sulawesi Selatan bagi para tuan untuk membuang budak yang tidak dikehendaki. Caranya, tuan terdahulu mengambil uang pinjaman dari seorang kreditur yang nantinya menjadi tuan baru bagi budak. Budak yang menjadi jaminan harus bekerja sampai ia dapat menebus utang, walau kemudian seringkali terjadi penipuan agar utang tersebut tidak dapat dilunasi. Istilah “orang jaminan” agak rancu dengan “budak utang” yang oleh Thosibo dibedakan. “Budak utang” menurutnya berasal dari orang bebas yang memiliki utang sejumlah harga standard seorang budak yang dijadikan budak oleh pemberi utang atau siapa pun yang membayarkan utangnya tanpa penangguhan waktu pem-

bayaran. Fenomena “budak utang” dipicu oleh kebutuhan hidup dan biasa terjadi di kota-kota pelabuhan (Thosibo, 2002: 152; 97).

Praktik yang disampaikan Thosibo tersebut meski sejenis namun agak berbeda dengan praktik *pandeling* yang lazim berlaku di Kesultanan Pontianak dan kerajaan-kerajaan Kalimantan Barat lain. Sebagaimana yang disampaikan asisten residen Pontianak tahun 1843 bahwa banyak cara dalam memperdagangkan budak di sini sehingga *pandeling* dapat berwujud dalam bentuk lain namun dengan konsekuensi yang sama (*Algemeen Verslag*, 1843). Mengenai varian *pandeling* dalam masyarakat Melayu dan Dayak ini dijelaskan oleh asisten residen selanjutnya, Cornelis Kater yakni *budak*, *orang dalem*, *orang negrie*, atau *orang boemie*. Mereka adalah tawanan perompak yang dijual sebagai budak, tawanan perang, upeti, atau diperlakukan sebagai alat pembayaran utang, denda, dan pajak. Praktik *pandeling* paling umum di Pontianak adalah memperkerjakan anak-anak perempuan Dayak yang dijamin oleh orang tuanya sebagai ganti penunggakan pembayaran pajak atau denda dari utang. Para *pandeling* ini seringkali dibeli oleh para pedagang (Kater, 1871: 296-299).

Penduduk kelas atas biasanya juga memiliki *pandeling* atau sering disebut *orang berutang badan*. Mereka bekerja untuk sejumlah uang dalam perjanjian gadai. Akan tetapi utang tersebut seringkali tidak dapat dikurangi oleh kinerja pekerjaan rumahnya atau diganti oleh anak-anaknya yang kemudian bertanggung jawab untuk utang orang tua mereka sehingga sebenarnya mereka tidak pernah bisa mendapatkan kebebasan (*Adatrechtbundel XXVI*, 1926: 418).

Adapun keberadaan *pandeling* Bugis di Pontianak yang disebut Enthoven mulai meledak¹⁷ di pertengahan abad ke-19 ini memunculkan bentuk praktik *pandeling* yang diakui Cornelis Kater berbeda dari yang diberlakukan di Pontianak dan kerajaan-kerajaan Kalimantan Barat lainnya (Enthoven,1903: 852; Kater, 1871: 299-300). Dengan membandingkan hasil pengamatan Enthoven dan investigasi Wijnen, dapat diketahui bentuk transaksi *pandeling* berikut.

Pandeling ini umumnya dimulai dari pemesanan pekerja Bugis oleh para pemilik modal yang pada abad ke-19 sebagian besar adalah pemilik lahan yang akan dikembangkan menjadi perkebunan kelapa. Melalui sebuah kontrak kerja yang disepakati oleh migran Bugis sejak di Sulawesi Selatan, mereka terikat untuk dibawa dan bekerja di Pontianak. Ratusan orang Bugis tersebut dijemput menggunakan kapal Bugis milik juragan-juragan Bugis kaya. Juragan yang sebagian besar adalah haji-haji di Pontianak ini berperan sebagai pemborong para migran Bugis tersebut. Sesampainya di Pontianak, mereka sudah terikat utang dan menjadi *pandeling* bagi para syarif, said, dan haji-haji pemilik lahan perkebunan kelapa yang luas (Wijnen, 1871: 315; Enthoven, 1903: 853). Pemesan yang disebut oleh pejabat kolonial sebagai orang-orang Arab pelanggar peraturan *pandelingschap*. *Pandeling* Sulawesi yang datang bahkan berupa keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak berusia 10-12 tahun yang semuanya dijadikan *pandeling* (*Algemeene Verslag*, 1877).

Adapun yang membawa semua orang-orang Sulawesi dalam keadaan mengutang adalah raja atau bangsawan yang membutuhkan uang. Melalui perjanjian yang dilakukan menurut Wijnen berarti merekalah yang menjadi penghubung dalam praktik *pandeling* di

¹⁷ Migrasi orang Bugis dapat dipantau dari laporan perkembangan jumlah penduduk Bugis di Pontianak pada Bab II.

Pontianak. Sebab para *pandeling* tersebut yang menjadi jaminan (Wijnen, 1871: 315).

Berdasar kedua sumber yang telah disebut di atas, diketahui bahwa semula orang-orang Bugis yang dibawa ke Pontianak bukanlah orang bebas melainkan selalu berada dalam keadaan perbudakan atau disebut sebagai *pandelingschap philanttropisch* yang dapat diartikan dijalankan secara sukarela atas pilihan individu (Wijnen, 1871: 315). Sementara Enthoven pada awal abad ke-20 yang meski menyatakan orang-orang Bugis tersebut sebagai orang-orang bebas bukan berstatus sebagai *pandeling* karena *pandeling* telah dilarang secara hukum, namun ia mengakui bahwa dalam praktiknya keberadaan orang Bugis di Pontianak menyerupai *pandeling* (Enthoven, 1903: 852-854). Perbedaan pandangan ini kemungkinan karena setelah tahun 1875 di Sulawesi Selatan mulai diterapkan aturan pendaftaran budak dengan konsekuensi bagi yang tidak terdaftar akan dibebaskan. Walaupun demikian, perbudakan di Sulawesi Selatan tidak pernah dihapuskan dan menjadi pengecualian untuk diperbolehkan oleh pemerintah kolonial (Thosibo, 2002: 156-157). Adapun proses pendaftaran di Pontianak juga bermasalah terutama pada masa awal sosialisasi sistem tersebut di tahun 1859 (*Algemeene Verslag*, 1859).

Perbedaan pandangan tersebut sebenarnya tidak perlu jika melihat kesamaan bentuk ikatan kerja yang diberlakukan terhadap para migran Bugis tersebut. Kontrak secara umum meliputi kesepakatan jumlah upah¹⁸ yang diperoleh setiap migran Bugis per-tahun, ditambah tanggungan biaya hidup, tempat tinggal, pakaian yang seringkali mereka terima lebih dulu sebagai uang muka/persekot (*voorschot*) (Enthoven, 1903: 853), dan biaya perjalanan.

¹⁸ Kebanyakan dari mereka diikat oleh gaji sebesar 10 dollar setahun (Enthoven, 1903: 853).

Kontrak kerja seperti ini serupa dengan yang diterapkan pada *pandeling-pandeling* lain dari Jawa yang dipekerjakan oleh orang-orang Cina. Mereka diberi uang muka terlebih dahulu sebelum menandatangani kontrak yang ditandatangani di muka kepala pribumi. Saat tiba di Pontianak mereka dihadapkan dengan tagihan yang memuat besar jumlah uang pinjaman, biaya perjalanan, biaya makan, dan biaya pakaian (Wijnen, 1871: 315; 317-318).¹⁹

Menurut Wijnen, kedatangan orang-orang Bugis ke Pontianak tersebut sebenarnya menanggung pembayaran utang penjamin (*pandheer*) mereka di Sulawesi dengan jumlah yang tidak mereka ketahui. Akan tetapi jumlahnya selalu lebih tinggi dari yang mereka gadaikan. Bahkan adapula orang yang tidak menyadari bahwa mereka tengah berada dalam praktik utang *pandeling* (*pandschuld*) (Wijnen, 1871: 315).

Berbeda dengan Wijnen, Kapten Niclou menaksir total utang *pandeling* Bugis rata-rata berjumlah f. 75 per kepala pada sekitar tahun 1869. Jumlah ini dibayar oleh kepala keluarga termasuk bagi dirinya sendiri dalam tempo empat atau lima tahun. Penebusan dilakukan secara bertahap. Pada tahun pertama, mereka diwajibkan untuk menanam kelapa dan majikan masih menyediakan segala kebutuhan *pandeling*. Selama tahun kedua, mereka hanya disediakan bibit yang diperlukan untuk penciptaan kebun baru, dan selain itu

¹⁹ Menurut Wijnen, orang-orang Jawa di Pontianak adalah orang bebas yang menjadi *pandeling*. Mereka yang umumnya perempuan dipekerjakan oleh orang Cina Pontianak untuk pelayanan paksa sebagai *babu*. Malangnya, keseluruhan jumlah utang yang nantinya dibayar dengan upah kerja tidak pernah terlunasi dengan pembayaran sewenang-wenang sejumlah f.3 per bulan kala itu (Wijnen, 1871: 317-318). Bentuk relasi *pandeling* yang dicontoh oleh hartawan-hartawan Cina seperti Namun, hal itu telah memunculkan ide yang sangat tidak menguntungkan yang dibuat oleh pemerintah kolonial di Pontianak, yakni di tahun 1865 perempuan-perempuan Jawa yang bebas dipaksa bekerja kepada orang-orang Cina di Pontianak. Seperti perempuan Jawa yang bekerja pada Kapitein Cina Kwee Kom Beng, tetapi bentuk relasi kerja ini bukan *pandeling*. Walau praktiknya, ada saja perjanjian-perjanjian dengan bentuk *pandeling* dan tidak ada paksaan dalam waktu tersebut (Kater, 1871: 303).

mereka harus memiliki tanaman dalam pemeliharaan mereka. Dari pohon yang ditanam sekarang, sebagian dimiliki oleh *pandeling* dan sebagian lainnya untuk majikan. Melalui pembagian tersebut *pandeling* diasumsikan dapat memperoleh pendapatan melebihi jumlah utang dalam waktu empat atau lima tahun. Dengan demikian, mereka dapat lepas dari kontrak pertama dan akan membuat keadaan imigran lebih baik dan melepaskan status *pandeling* mereka (Anonim, 1871: 47).

Asumsi Kapten Niclou akan pelunasan utang para *pandeling* Bugis tersebut tidak sepenuhnya terbukti jika merujuk pernyataan Enthoven mengenai kecilnya kemampuan pelunasan utang para migran Bugis yang telah lama bermukim di Pontianak pada awal abad ke-20. Meskipun keberadaan sejumlah *pandeling* yang bahkan menjadi kaya-raya dari budidaya kelapa atau memiliki perkebunan kelapa sendiri juga menjadi bukti keberhasilan praktik *pandeling* ini (Enthoven, 1903: 854). Keberhasilan praktik ini justru lebih terlihat pada peningkatan kekayaan orang-orang Melayu. Sebuah rumah pemilik kebun Melayu bahkan ada yang dibangun mencapai 5000 dolar. Hal ini menurut redaktur jurnal TNI dapat dibuktikan dari usaha yang terus menerus untuk mendatangkan migran Bugis ke Pontianak. Setiap tahun jumlah *pandeling* Bugis yang datang mencapai ratusan jiwa (Anonim, 1871: 46), sebagaimana yang tampak dalam rekapitulasi berikut.

Tabel 2
Jumlah Kedatangan *Pandeling* Bugis Per-tahun
Pada Paruh Kedua Abad ke-19

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Anak-Anak	Total
1866	149	29	42	220
1867	413	195	127	735
1868	286	170	71	527
1877	89	21	2	133
1890	-	-	-	112

(Sumber: Anonim, 1871: 46; *Algemeene Verslag*, 1877; *Algemeene Verslag*, 1890).

Meski dalam rekapitulasi tersebut tren jumlah kedatangan migran Bugis menurun namun jika dibandingkan dengan rekapitulasi jumlah penduduk Bugis di wilayah Kesultanan Pontianak pada Bab II dapat dilihat peningkatan signifikan dalam kurun tahun 1870an hingga 1900an. Peningkatan imigran Bugis pada tiga dekade terakhir abad ke-19 yang merupakan masa pemerintahan Sultan Syarif Yusuf Alkadrie ini menurut Enthoven terukur pada perluasan wilayah permukiman Bugis di Sungai Kakap (Enthoven, 1903: 847; 849)²⁰.

Adapun penurunan angka imigrasi *pandeling* Bugis pada tabel kemungkinan disebabkan oleh penilaian status mereka oleh pejabat kolonial sudah seperti penduduk setempat dan tidak terdaftar sebagai *pandeling* sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Mengenai pandangan status melalui sistem pendaftaran ini disebut dalam laporan umum tahun 1880. Padahal dalam laporan tersebut dilaporkan bahwa pada tahun 1880 migrasi Bugis ke Pontianak berdasarkan pesanan masih ada. Selain menggunakan perahu layar kayu dari Sulawesi mereka

²⁰ Mengenai perluasan permukiman orang-orang Bugis pada 1886 disebut tidak hanya di Sungai Kakap, tetapi juga di Kubu (*Algemeene Verslag*, 1886).

juga didatangkan menggunakan kapal api (*stoomer*) melalui Singapura (*Algemeene Verslag*, 1880) yang menjadi alternatif pemasaran budak dari pelabuhan Pare-Pare, Palopo, dan Bone pada abad ke-19 ketika Kalimantan menjadi tempat pemasaran utama (Thosibo, 2002: 134).

Selain karena pesanan yang terus menerus dari para hartawan di Pontianak, pemerintah kolonial sangat mendukung kedatangan migran Bugis untuk pengembangan ekonomi di wilayah Kalimantan (*Algemeene Verslag* dalam berbagai tahun). Oleh karena itu pula praktik *pandeling* yang secara hukum terlarang sejak 1859 masih terus berlangsung sehingga menjadi sorotan bagi para aktivis anti-perbudakan.

Salah satu kasus migrasi *pandeling* Bugis ke Pontianak yang mendapat perhatian besar terjadi di tahun 1869. Berawal dari berita di *Java-Courant*, 800 orang yang diduga *pandeling* dimuat dalam sebuah kapal milik Nakhoda Adam dalam keadaan penuh sesak dan memuat sejumlah pengidap cacar juga *pandeling* anak-anak yang diduga adalah hasil penculikan. Berita semakin membawa keprihatinan karena mereka ditolak masuk ke Pontianak dan diasingkan ke sebuah pulau di sebelah barat laut Pontianak. Meski berita tersebut kemudian diklarifikasi oleh Kapten Niclou, pejabat kolonial setempat—bahwa pendatang Bugis yang sebenarnya berjumlah 500 orang ini dialihkan ke pulau yang layak untuk dikarantina dan telah divaksinasi terlebih dahulu— tetap saja mendapat kritik. Kritik disampaikan baik oleh redaksi maupun pejabat kolonial dalam jurnal TNI yang redaktornya adalah aktivis pembebasan perbudakan Baron van Hoevell (Anonim, 1871: 42-43).

Kecuali itu, beberapa kasus penyalahgunaan atas praktik *pandeling* yang mengarah pada perdagangan manusia juga diungkap oleh mantan pejabat kolonial di Pontianak, Wijnen. Ia mengungkap praktik pembelian *pandeling* oleh banyak penduduk di Pontianak yang kaya raya

dengan jumlah beberapa *gulden* (Wijnen, 1871: 315). Transaksi pembelian *pandeling* oleh para pemilik kebun dilakukan dengan membayar uang muka kepada para pendatang baru tersebut di Pontianak. Hal ini menunjukkan adanya transaksi jual-beli lain selain yang dilakukan di Tanah Sulawesi (Anonim, 1871: 47).

Pelanggaran lain ditunjukkan oleh redaktur TNI yang menginvestigasi kontrak *pandeling* di pengadilan Pontianak. Ia menemukan bahwa sejumlah kontrak *pandeling* telah dikonversi sesuai dengan peraturan setempat (Pontianak). Kontrak yang dibuat di Pontianak ini meski tetap menggunakan bahasa para pengutang Bugis terlihat direkayasa oleh pemerintah setempat. Perubahan yang mengarah pada rekayasa yang tidak dipahami oleh para *pandeling* adalah konversi jumlah utang dari mata uang Bugis yang nilainya tidak terlalu besar disesuaikan dengan standar mata uang Hindia Belanda di Pontianak. Hutang yang semula misalnya senilai 88 sen berarti akan menjadi f. 2 pada masa itu. (Anonim, 1871: 47).

Atas berlangsungnya praktik *pandeling* terselubung yang terus menerus di Pontianak ini, Cornelis Kater menyoal tentang kelemahan aturan sistem *pandeling* dan kesulitan penerapan karena bertubrukan dengan kondisi sosial masyarakat Pontianak terutama pada kultur keluarga Kesultanan. Beberapa kelemahan antara lain ketiadaan batas waktu penutupan masa kerja dalam kontrak; para majikan diberi kebebasan untuk memilih bentuk upah bagi *pandeling* berupa uang atau *natura*; aturan tidak berlaku untuk varian budak lain yang biasa diterapkan di keluarga bangsawan dan hartawan seperti *anak mas* dan *orang boemi*. Kelemahan ini bahkan ditanggapi oleh pejabat kolonial anti-perbudakan Wijnen dengan sebutan negara setengah hati. Adapun sulitnya penerapan aturan terletak pada ketentuan bahwa proses penghapusan status *pandeling* yang harus melalui proses pendaftaran kepada pemerintah kolonial ditanggapi “dingin”

oleh para migran sendiri. Padahal dalam aturan disebut bahwa kebebasan dapat berlaku melalui persetujuan dari pengutang atau *pandeling* itu sendiri (Kater, 1871: 300).

Keengganan para migran Bugis untuk mendaftar dengan konsekuensi menjadi abdi (*onderdaan/ kawula*) pemerintah kolonial (Wijnen, 1871: 316) kemungkinan karena mereka tetap ingin menjadi abdi Sultan meski tetap dalam status *pandeling*. Status sebagai abdi Sultan bahkan semakin kuat dengan ikatan pernikahan para migran Bugis dengan orang Melayu setempat. Mengenai kemauan ini dapat kita telaah dari kondisi sosio-kultural masyarakat Bugis khususnya yang terkait dengan praktik perbudakan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penelitian Anwar Thosibo, praktik *pandeling* di Sulawesi Selatan berkembang di abad ke-19 karena ketidakamanan akibat peperangan, baik dengan Belanda maupun antar-kerajaan. Perang menyebabkan penindasan antar-kelompok baik berupa pemerasan, pencurian, penganiayaan, maupun perbudakan melalui penculikan (Thosibo, 22: 76). Oleh karena itu, kebutuhan untuk mendapat perlindungan dari ketidakamanan dan permasalahan yang terjadi masa itu membentuk keterikatan antara tuan dan hamba dalam masyarakat Bugis-Makassar bukan hanya loyalitas terhadap pemimpin ataupun jaminan atas kecukupan kebutuhan hidup (Pelras, 2000: 403).

Orang Bugis (dan Makassar) menyebut keterikatan tersebut dengan istilah *minawang* yang dimaknai Chabot sebagai “sistem pengikut” sebagaimana kutipan Pelras. Ikatan yang paling umum terjalin antara pemimpin wilayah (*karaeng*) dengan rakyat yang bersedia mengikuti (*minawang*). Hubungan ini ditandai oleh gejala kepengikutan dan kendali tuan atas hambanya yang sebenarnya saling membutuhkan antara satu sama lain. Di satu sisi sang pemimpin harus menjaga kesejahteraan para pengikut. Di sisi lain para pengikut

akan menyokong pemimpinnya mulai dari perang atau sekedar mempersiapkan pesta di rumah tuannya. Hubungan ini membentuk ikatan kebergantungan satu sama lain dan karena sifatnya sukarela dan dapat diakhiri kapan saja maka masing-masing pihak harus memenuhi kewajiban untuk mempertahankan pelayanan (Pelras, 2002: 397-398). Melalui ikatan selentur itu, tidak heran jika masyarakat Bugis lebih memilih jadi *pandeling* dengan jaminan perlindungan ketimbang menjadi orang bebas namun terancam tindakan penculikan dan perbudakan.

Meski lentur, ikatan yang dikategorikan oleh Heddy Shri Ahimsa Putra dan Christian Pelras sebagai hubungan patron-klien ini sangat sentral dan penting dalam berbagai proses sosial dan berbagai bidang kehidupan di Sulawesi Selatan, termasuk aktivitas ekonomi yang akan dibahas lebih lanjut dalam subbab 3.2. Hubungan yang dibentuk dengan lapisan sosial yang tidak setara ini justru akan menghasilkan kerja sama karena hubungan setara hanya akan memunculkan kompetisi (Pelras, 2000: 397).

Sistem patronase yang telah mengakar bagi masyarakat di Sulawesi Selatan ini sepertinya dibangun dalam relasi ekonomi para *pandeling* di Pontianak. Ikatan dengan patron utama sepertinya telah dipupuk sejak migran Bugis menginjakkan kaki untuk pertama kali dengan berziarah ke makam keluarga Sultan Pontianak di Batulayang. Pemimpin kapal yang membawa migran Bugis akan mengatakan bahwa di permakaman tersebut bersemayam para leluhur Bugis dari kalangan bangsawan kelas atas. Sebagaimana dipahami, Sultan pertama Pontianak memiliki hubungan kuat dengan Opu Daeng Menambon. Selain dibesarkan di Kerajaan Mempawah, tempat ayah Syarif Abdul Rahman mengabdikan sebagai mufti, puteri Opu, Utin Candramidi juga dinikahkan dengan Sultan. Oleh karena itu

siapapun majikan para migran Bugis tersebut, sultan Pontianak akan tetap menduduki posisi patron tertinggi bagi mereka.

Kenyamanan akan ikatan tersebut sepertinya dibuktikan dengan sikap mereka terhadap aturan registrasi pemerintah kolonial dan hampir tidak pernah ada keluhan yang disampaikan oleh budak-budak Bugis kepada pemerintah kolonial atas perlakuan yang kurang baik dari tuan-tuan mereka (Enthoven, 1903: 853-854). Tambahan lagi, menurut Kapten Niclou berdasarkan pengakuan dari penduduk Bugis di Sungai Kakap dinyatakan bahwa kedatangan sejumlah besar orang Bugis dari Sulawesi yang berada dalam situasi perang. Situasi yang memberi penderitaan tersebut dan kekuasaan sewenang-wenang menjadi alasan para pendatang Bugis untuk menetap di tanah Kalimantan (Anonim, 1871: 48).

Aktivitas Ekonomi Migran Bugis Baru

Migran Bugis yang datang pada paruh kedua abad ke-20 telah membuka permukiman di pesisir laut bagian selatan Pontianak. Mereka dikenal sebagai kelompok yang pertama kali mengeksplorasi pantai bagian selatan tersebut (Kater, 1871: 302). Berdasarkan penelitian pejabat kolonial diketahui bahwa pemukim Bugis lebih banyak tinggal di pesisir. Pada sebuah permukiman biasanya ditempati ratusan orang yang berasal dari tempat yang sama (Wijnen 1871: 318).

Permukiman tersebut belum berupa rumah yang permanen terutama menggunakan kayu nibung pada kedatangan Kater di tahun 1851. Kala itu perempuan dan anak-anak masih jarang terlihat karena diperkirakan takut akan bajak laut menandakan suasana yang masih sepi dan rawan. Daerah pesisir selatan Pontianak ini

pun dipandang masih sangat kekurangan tenaga kerja dan dianggap cocok untuk mengembangkan kebun kelapa (Kater, 1871: 302-303).

Daerah pesisir yang sejak awal abad ke-19 sebenarnya telah diupayakan untuk dikembangkan kebun kelapa baru terlihat berkembang dengan didatangkannya ratusan migran Bugis setiap tahun oleh pemilik lahan. Maka dari itu tidak mengherankan jika koloni orang Bugis di pertengahan abad ke- 19 ini diberitakan pejabat kolonial lebih banyak menangani pertanian meski perdagangan masih memberi keuntungan lebih banyak (*Politieke Verslag*, 1856).

Pada tahun 1870an tanah yang dibudidayakan oleh orang-orang Bugis di sepanjang pantai selatan mencapai sekitar 130 kilometer persegi. Di area kebun kelapa yang luas, lebih dari 10.000 jiwa migran Bugis menghuni sembari memberdayakan lahan dengan jumlah pohon buah telah mencapai lebih dari tiga juta pohon. Perhitungan jumlah produk tahunan dari setiap pohon serendah-rendahnya, dan dengan demikian hanya 15 butir, maka dalam satu tahun akan diperoleh 45 juta butir (Anonim, 1871: 44).

Wilayah antara Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Punggur Besar, di mana Sungai Kakap merupakan pusatnya ditanami kelapa. Penanaman bermula dari para *pandeling* Sulawesi. Lahan berawa yang berpenyakit awalnya menimbulkan korban. Kehidupan mereka membaik setelah tanah rawa dibuka jaringan kanal oleh para pekerja secara bersama-sama. Kanal membuka jalan bagi air berlebih yang dikandung tanah rawa untuk mengalir ke laut sehingga tanah dapat ditanami dan dihuni sebagai tempat tinggal (ENI: 27).

Pandeling Bugis yang menurut Kapten Niclou hanya bekerja untuk membersihkan lahan, menanam lahan sesuai dengan kesepakatan jumlah pohon kelapa, dan memelihara lahan. Adapun penanaman seperti padi, pisang, dan umbi adalah keuntungan pribadi bagi

mereka. Penarikan pajak dari hasil produksi dikenakan oleh Kesultanan sebesar 1 persen (Anonim, 1871: 47-48).

Dalam perkembangannya di tahun 1870an telah dapat ditemukan sejumlah orang-orang Bugis yang kaya dan memiliki sebidang tanah yang dari menanam kelapa. Hasil produksinya tersebut yang digunakan untuk membayar utang mereka (Wijnen, 1871: 315-316).

Di antara saudagar Bugis yang kaya-raya tersebut di antaranya adalah Intje Thalip. Kekayaannya bahkan mampu dan dipercaya sebagai penjamin *pachter* (penguasa sewa pajak) opium di Kalimantan Barat yang pada 1872 dipegang oleh Kapthai Mandor Lioe A Sin. Bahkan ketika Lioe bangkrut karena hasil penjualan opium sangat menurun, Intje Thalip selama 2 tahun sempat menguasai *pacht* (sistem sewa hak memungut pajak) untuk komoditas opium bagi wilayah Kalimantan Barat. Itu menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki Intje Thalip sangat besar karena penguasaan hak memungut pajak opium bisa didapatkan melalui sistem lelang dengan sejumlah uang sangat besar. Pada tahun 1873 Intje Thalip menyewa hak tersebut dengan uang sejumlah f. 139.440 (*Politieke Verslag* 1866). Akan tetapi kondisi tersebut sangat kecil karena biaya kehidupan yang harus dipenuhi membuat sebagian besar dari mereka tetap sebagai *pandeling* (Wijnen, 1871: 315-316).

Pada akhir abad ke-19 migran Bugis yang telah lama bekerja di Pontianak dilaporkan telah mampu memiliki kebun kelapa. Migran lama ini bahkan kemudian mengikuti cara pemilik lahan sebelumnya dengan mendatangkan migran Bugis untuk bekerja di kebun kelapa miliknya (*Algemeene Verslag*, 1890).

Pemilik kebun-kebun besar tersebut adalah para *pandeling* awal. Sebagian besar memperoleh kebun tersebut dari penjualan penduduk kaya setempat. Jumlah *pandeling* awal ini semestinya lebih besar jika

kondisi lingkungan telah baik dan angka kematian rendah (Kater, 1871: 303).

Besarnya hasil produksi kelapa pada abad ke-19 menambah ragam kegiatan lain. Mulai dari pengumpulan buah-buahan, pengolahan menjadi minyak, perdagangan minyak kelapa, serta pembuatan tikar dan karpet (Anonim, 1871: 44; 46). Pekerjaan mengolah minyak lebih diminati orang-orang Cina. Sementara orang-orang Bugis lebih memilih menghabiskan waktu mereka untuk menanam kelapa, memelihara kebun, mengumpulkan buah dan tanaman (Anonim, 1871: 46).²¹

Produksi yang besar tersebut bahkan membuat seorang pejabat pemerintah kolonial begitu yakin untuk mendirikan pabrik minyak di dekat Pontianak sehingga berupaya mencari modal untuk menciptakan mesin uap dan hidrolik. Sayangnya, hingga tahun 1870an upaya tersebut tidak berhasil. Pejabat tersebut mempersoalkan kurangnya semangat kewirausahaan dan modal yang relatif minim. Rencana tersebut juga akan merevisi setidaknya satu juta kilogram kelapa untuk pasar Eropa (Anonim, 1871: 46).

Produksi minyak secara sederhana terutama berlangsung di mulut Sungai Kakap. Yakni di permukiman di mana komunitas Bugis berbaur dengan komunitas Cina. Pada tahun 1870an terhitung setidaknya 300 jiwa penduduk Cina fokus pada pekerjaan tersebut dan sebagian kecil orang-orang Bugis (Anonim, 1871: 46). Adapun pabrik minyak baru berdiri pada 1888 oleh Tuan Hemmes dan pada

²¹ Akan tetapi karena metode produksi yang digunakan oleh orang Cina sangat primitif, sehingga penggunaan tenaga kerja dan hasil pendapatan yang rendah membuat rugi. Dalam tulisan Sturler yang berjudul "Landbouw Tusschen de Keerkringen" disorot keuntungan dari produksi minyak dalam skala besar, dengan semua sumber daya ilmu yang baru akan dibuat di Pontianak. Menurut Struler, jika diperkirakan 100 buah butir kelapa di Sungai Kakap dijual seharga f.2 hingga f. 2,50 dengan biaya transportasi yang sangat murah dengan bahan bakar yang dapat diperoleh dengan menebang kayu, menggunakan mesin hidrolik yang telah disiapkan. Menurut perhitungan Struler hasil olehan kelapa berupa minyak akan meningkatkan nilai ekonomis kelapa (Anonim, 1871: 46).

1893 oleh Teng Seng Hie (van Sandick dan V.J. van Marle, 1919: 202).

Pembukaan kebun kelapa telah mendorong pendirian pabrik minyak atau kopra dan ledakan perdagangan produk-produk ini didorong terutama di Singapura. Periode akhir abad ke-19 adalah masa untuk menikmati hasil dan kesejahteraan dari usaha tersebut. Pertumbuhan kebun kelapa dengan keberadaan *pandeling* telah merintis pembukaan akses transportasi air dan darat. Pemerintah kolonial dapat mengetahui dan membuat batas akhir pal. Pemerintah bahkan memborongkan penggalian kanal dari Pontianak ke Sungai Kakap dan sebuah jalan tanah yang bagus dan berakhir pada tempat di mana kontrolir berkedudukan di Sungai Kakap. Pembangunan dilakukan secara bertahap mengikuti pembebasan wilayah dan mobilisasi para *pandeling* Bugis (ENI, 1917: 27).

Kanal-kanal buatan saling terhubung satu sama lain. Kanal berfungsi sebagai drainase, bagian dari teknik penanaman kebun kelapa, juga untuk pengangkutan hasil produk. Kanal umum akan dilalui setiap waktu oleh perahu sarat muatan butir kelapa atau talian panjang kelapa yang mengambang dan mengalir ke tempat tujuan mereka. Sepanjang tepian sungai tersebut (dari Sungai Kakap hingga Sungai Udang) terdapat rumah-rumah orang Bugis yang diselingi rumah orang-orang Cina. Rumah-rumah tersebut dikelilingi oleh tumpukan tinggi kelapa yang telah diasapi, dan pada area antara rumah terdapat aktivitas pembuatan minyak (Anonim, 1871: 45). Pembuatan minyak di sekitar area permukiman dilakukan secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri²².

Kanal ini dibangun selama bertahun-tahun, terutama karena besarnya risiko dalam perjalanan lewat laut dengan perahu kecil. Kecelakaan yang seringkali terjadi membuat para pekerja, termasuk

²² Wawancara dengan Aidin, B.A. pada April 2016.

perempuan dan anak-anak yang akan menuju kebun kelapa ingin cara yang lebih aman. Oleh karena itu para *pandeling* menggali kanal-kanal ini (Wijnen, 1871: 318-319).

Pemerintah kolonial juga memiliki kepentingan atas terbangunnya kanal terutama sarana komunikasi dan untuk kekuatan militer. Akses bagi polisi dan pemerintah menyebabkan asisten residen kala itu meminta Sultan untuk menggunakan pengaruhnya kepada orang-orang Bugis dalam pembangunan kanal-kanal ini. (Wijnen, 1871: 318-319).

Melalui usaha secara personal Pangeran Bendahara yang juga memiliki area perkebunan kelapa yang luas di Sungai Kakap, pembangunan kanal dapat dilanjutkan. Kanal bahkan dapat dilalui oleh perahu saat tidak pasang (Wijnen, 1871: 319).

Kanal utama mereka dimulai dari Sungai Kakap dan berakhir di Sungai Udang mencapai panjang 10.000 meter, lebar hingga 6,5 meter, dan kedalaman 1 meter. Jika air surut kanal hanya bisa dialiri oleh sampan. Kanal-kanal tersebut dibangun secara swadaya oleh penduduk Sungai Kakap sendiri tanpa tekanan dan bantuan dari pemerintah. Pembangunan kanal didasari oleh kerjasama yang saling menguntungkan. Kanal dibangun atas kebutuhan untuk kecepatan hubungan langsung dari Sungai Kakap ke Pontianak. Menurut Kapten Niclou, pembangunan kanal bertumpu pada kekuatan penduduk Bugis sendiri tanpa modal apapun untuk upah harian dan kebutuhan lainnya dari pemerintah kolonial. Hal ini dapat dilakukan ketika mereka memiliki jaminan perlindungan (Anonim, 1871: 45).

Selain kanal, keberadaan para migran Bugis memunculkan ide pembangunan jalan dari permukiman Bugis tersebut ke Kota Pontianak. Pembangunan ini diakui asisten residen kala itu sulit untuk diwujudkan karena belum ada manusia yang masuk ke hutan rawa ini. Cara unik untuk penentuan arah pembangunan jalan

dilakukan dengan mengikuti arah suara meriam. Untuk itu meriam ditembakkan secara terus menerus dari benteng di Pontianak. Pemerintah kolonial mengerahkan para *pandeling* Bugis untuk proyek ini. Dengan imbalan kebebasan, para *pandeling* tidak menunjukkan keengganan atau rasa jijik saat mengerjakan jalan (Wijnen 1871: 318-319).

Pembangunan jalan dilanjutkan pada tahun 1865 dengan sistem kerja paksa (*corvee*), sebuah modifikasi sistem perbudakan oleh pemerintah kolonial. Para *pandeling* memang tidak lagi disebut dalam pembangunan jalan antara Pontianak dan Sungai Kakap sepanjang 9 pal ini, namun kemungkinan migran Bugis tersebut masih dilibatkan. Jalan setapak menuju Sungai Kakap mulai dapat dibangun melalui kerja sama dengan Sultan. Jalan ini setiap hari dilewati oleh orang-orang Bugis dan Cina. Adapun sisa lahan yang ada di wilayah tersebut dibagikan oleh Sultan (Wijnen, 1871: 319; Kater, 1871: 304).

Rintisan pembangunan kanal dan jalan yang bermula dari kedatangan, bermukim, dan aktivitas perkebunan kelapa para migran Bugis, menurut kalkulasi Kater sudah terbangun selama 15 tahun sejak pertengahan abad ke-19. Kater mengapresiasi perluasan wilayah Sungai Kakap terkait pula dengan pembangunan tempat kedudukan kontrolir pemerintah kolonial di Kuala Kakap, dan pembangunan tersebut sangat bergantung pada pembukaan wilayah yang dilakukan oleh para *pandeling* Bugis. Sebab percobaan lain di bawah pimpinan *adjutant-onderofficier* Drion gagal. Pemerintah kolonial pun bahkan sempat mendatangkan tawanan dari Sintang dan Melawi, namun tidak memberi banyak perubahan kondisi jalan menuju Sungai Kakap (Kater, 1871: 303-304) Selain mengerjakan ladang, merawat kebun-kebun, dan menanam pohon kelapa, banyak di antara mereka yang meninggalkan separuh waktu setiap harinya

untuk diri sendiri agar dapat membebaskan diri dari utang sehingga dapat memperbaiki nasib. Salah satu cara yang mereka pilih adalah mendayung *tambangan* orang lain. Dengan mendayung tambangan selama satu sampai enam jam sehari dapat memberi penghasilan setidaknya 25 sen per hari untuk dapat dibayarkan kepada majikan mereka, yang memberi perahu dan peralatan *menambang*. Adapun sisanya sekitar lebih kurang setengah *gulden* digunakan untuk hidup mereka sendiri (Wijnen, 1871: 315-316; Kater, 1871: 303).

Sistem Patronase dalam Aktivitas Orang Bugis

Kedatangan *pandeling* Bugis dipandang oleh Wijnen, asisten residen kala itu sebagai tindakan spekulasi atas keadaan penduduk yang ada dianggap tidak produktif (Wijnen, 1871: 315). Orang-orang Bugis yang dinilai oleh pejabat kolonial menganut nilai kejujuran dan itikad baik dalam memenuhi komitmen atau kewajiban mereka, menghasilkan etos kerja yang rajin dan menjadikan sebuah daerah menjadi produktif (Anonim, 1871: 44-45).

Produktivitas dan keberadaan mereka yang berkelanjutan sehingga dapat membuka permukiman yang luas di Pontianak seperti ini tidak dapat dilepaskan dari berjalannya sistem patronase yang mereka anut. Sifat hierarkis masyarakat Bugis (dan Makassar) yang sangat kuat menjadi faktor pendukung pembentukan sistem tersebut (Pelras, 2000: 431). Sistem hierarkis membentuk hubungan otoritas dari yang tinggi terhadap yang rendah dan kesadaran bahwa antar yang tinggi dan rendah saling membutuhkan satu sama lain. Pada akhirnya, sistem hierarkis membentuk pemahaman masyarakat akan kerja sama yang bersifat resiprositas yang terwujud dalam ikatan-ikatan kewajiban manusia (Thosibo, 2002: 16). Bahkan ketika mereka berada di luar Tanah Bugis, elemen struktur

patronase tersebut terdeteksi. Dalam pengamatan Komisaris E.A. Francis tahun 1832 penggunaan gelar *pënggawa* (*pangauwa* atau *punggawa* atau *pongawa*) pada pemimpin komunitas Bugis telah dikenal. Para pemimpin ini dikatakan berasal dari kalangan Bugis sendiri (Francis, 1838: 18-19).

Hubungan patron-klien dipahami orang Bugis sebagai ikatan *ajjoareng-joa*. *Ajjoareng* adalah panutan, sedangkan *joa* adalah pengikut (Ahimsa-Putra, 1988: 12). Ikatan paling umum terjadi antara penguasa wilayah yang dipimpin oleh bangsawan (*wanua* atau *kakaraengang*) dengan para pemimpin yang biasanya mewakili penduduk yakni *matoa*. Akan tetapi dalam hubungan ekonomi, istilah yang digunakan untuk *ajjoareng* adalah *punggawa*, sementara untuk *joa* digunakan istilah *sawi*. *Punggawa* secara umum dapat diartikan sebagai pemimpin atau bos, sedangkan *sawi* adalah bawahan. Jika dalam kegiatan pelayaran *punggawa* ditempati oleh kapten kapal, maka *sawi* ditempati oleh pelaut atau awak kapal (Pelras, 2000: 418).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa keberadaan para migran Bugis di Pontianak terhubung dengan beberapa lapis kalangan atau dengan perspektif lain membentuk beberapa jejaring patron. Dengan demikian, sistem patronase dapat membentuk apa yang dikatakan Pelras sebagai stuktur piramida.

Struktur dibentuk melalui berbagai tahap ikatan kerja berdasar kontrak sejak di tanah asal mereka. Lapis pertama yang berada langsung di atas para migran Bugis adalah pemimpin kapal yang sepertinya merupakan pemilik kapal. Seperti halnya kasus pemuatan *pandeling* tahun 1859, kapal yang mengangkut mereka adalah Haji Adam, sang pemilik kapal. Ikatan mereka dengan para pemimpin kapal ini sepertinya dekat. Hal ini dapat disimpulkan dari wawancara yang dilakukan oleh Cornelis Kater sekitar tahun 1870. Sebagian para *pandeling* Bugis di permukiman pesisir laut bagian selatan

Pontianak tersebut akan menyatakan diri sebagai keturunan dari Nakhoda Alie, Nakhoda Machmoet, dan Haji Adam terkait asal-usul mereka (Kater, 1871: 302). Dengan demikian, dalam masa tertentu para nakhoda atau pemilik kapal tersebut dapat dikategorikan sebagai patron pada tingkat terendah yang berhubungan langsung dengan para *pandeling* sebagai klien (*sawi*).

Akan tetapi setelah beralih-tangan pada pemilik lahan yang membeli dan mempekerjakan para *pandeling*, kemungkinan untuk terputus dari ikatan dengan para nakhoda tersebut juga besar. Terlepas masih atau tidaknya ikatan dengan nakhoda, patron lapis berikutnya adalah para pemilik lahan. Namun jika dalam laporan Komisaris E.A. Francis diketahui terdapat *punggawa* yang berwenang memimpin kelompok komunitas Bugis (Francis, 1838: 18-19), maka sepertinya *punggawa* adalah patron di atas nakhoda atau langsung berada di atas komunitas Bugis setidaknya untuk lahan yang sangat luas.

Berdasarkan penelitian Pelras, di Sulawesi Selatan *punggawa* biasanya bukan dari golongan bangsawan dan dinyatakan tidak lebih dari seorang pemimpin biasa. *Punggawa* bisa jadi adalah petani terkemuka atau kaya yang memiliki lahan yang luas, tetapi yang jelas ia memiliki pengaruh pribadi untuk dapat memanggil sejumlah pengikut tetap. Kemampuan memanggil atau daya untuk terus diikuti dari para *punggawa* akan terpelihara jika ia mampu memberi penghidupan bagi para *sawi* pengikutnya yang dalam hal ini para *pandeling*. Para *punggawa* juga akan menganggap diri sebagai pembimbing para *sawi* yang salah satu bentuknya adalah kewajiban membantu. Bentuk bantuan bisa diberikan ketika *sawi* sedang ter-timpa musibah atau hendak mengadakan selamatan. Bantuan ini bisa berupa pinjaman dengan pembayaran angsuran dari hasil kerja. Namun tidak jarang para *sawi* yang tidak mampu membayar malah

akan diberi pinjaman yang baru. Oleh karena itu, para *sawi* biasanya tidak hanya berutang uang saja tetapi juga berutang budi sehingga mereka akan memberi pelayanan dengan baik. Hubungan timbal balik inilah yang menguatkan ikatan patron klien tersebut (Pelras, 2000: 419-420; 423-424).

Patron di atas *punggawa* adalah para pemilik lahan luas seperti Pangeran Mangkubumi, para syarif, para said, dan para haji kaya lainnya. Adapun yang berada di posisi patron teratas dan menduduki pucuk teratas dalam piramida adalah Sultan selaku pemilik asal lahan-lahan tersebut sekaligus selaku pemimpin wilayah.²³

Berusaha untuk tidak gegabah dalam menghubungkan fenomena di atas dengan gejala patron klien, kami mencoba menelaah menggunakan pendekatan sistem budaya dan keadaan sebagaimana yang diajukan Heddy Shri Ahimsa Putra (1988) dalam kajiannya mengenai hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan pada akhir abad ke-19. Kajian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan pendekatan sistem budaya dilihat dari pelapisan status sosial, pelapisan kekuasaan, dan kekayaan. Indikator pertama ditunjukkan oleh ditunjukkan oleh berbagai kelas sosial di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Indikator kedua antara lain ditunjukkan oleh perilaku dalam interaksi sosial antara kelompok sosial, penggunaan tanda-tanda tertentu seperti tipe rumah yang berbeda bagi setiap kelompok sosial, dan terutama kepemilikan *gaukung* berupa benda sakral yang melegitimasi kekuasaan seseorang. Indikator ketiga ditunjukkan oleh kepemilikan tanah oleh kelompok sosial tertentu. Kecuali ketiga indikator tersebut, Heddy juga mengajukan kondisi masyarakat berupa ketidakamanan sosial berupa perang antar-faksi dalam kerajaan maupun dengan pihak pemerintah kolonial Belanda

²³ Sistem patronase ini juga harus dijelaskan praktiknya di bidang pertanian, khususnya perkebunan kelapa, tambangan, dll.

dan bentuk-bentuk unit kekerabatan yang secara keseluruhan membentuk gejala patronase.

Berpijak pada kajian tersebut, kami berasumsi bahwa ide atau pandangan hidup kondisi masyarakat terkait ikatan patron klien telah hidup dalam komunitas Bugis sejak berada di Sulawesi Selatan. Pandangan yang kemudian hidup dalam aktivitas ekonomi komunitas Bugis seperti paparan sebelumnya langgeng karena ditopang oleh kondisi sosial di daerah yang baru.

Perbedaan status sosial pada paruh kedua abad ke-19 pada komunitas Bugis yang sebagian besar datang dengan status *pandeling* menunjukkan keberadaan kelas khusus dalam masyarakat Pontianak. Kelas sosial lain adalah kerabat Kesultanan Pontianak sebagai golongan teratas; kelompok alim-ulama (kiai) di bawahnya; golongan pedagang elite terdekat Sultan yang umumnya berasal dari etnis Arab, Bugis (migran Bugis pendahulu), Banjar, dan Melayu; pegawai Kesultanan dan para kepala kampung; golongan pekerja lain seperti pedagang kecil, tukang, dan nelayan; sedang status budak berada paling bawah (Purwana *et al.*, 2004: 67-72).

Perbedaan pelapisan kekuasaan sepertinya kurang tampak pada masyarakat Pontianak. Kuasa tampak nyata pada kerabat sultan yang menduduki jabatan khusus seperti pangeran bendahara dan laksamana. Keterkaitan para pejabat dengan komunitas Bugis ini pun terjalin karena kepemilikan perkebunan kelapa. Perbedaan kekayaan sehubungan dengan komunitas Bugis periode medio abad ke-19 adalah kepemilikan tanah garapan mereka. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, tanah garapan tersebut dimiliki oleh Sultan, pejabat Kesultanan, dan para elite pedagang.

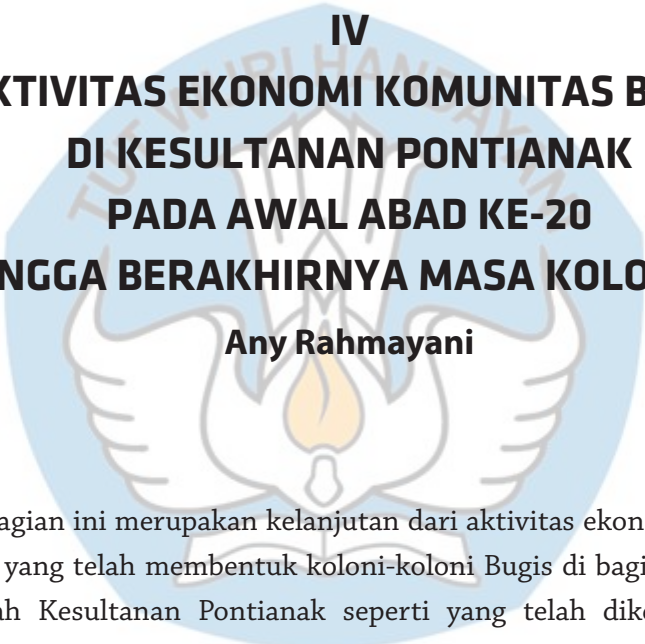
Adapun kondisi sosial berupa jaminan keamanan bagi komunitas Bugis telah dijamin oleh sultan, terutama dengan status ke'abdi'an (kekawulaan) mereka sebagai rakyat sultan. Status ini mengikat

mereka pada aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Kesultanan. Status ini diperkuat oleh keberadaan pemimpin komunitas Bugis yang secara struktur berada di bawah sultan.

Bentuk unit kekerabatan lain yang menempatkan migran Bugis untuk tinggal pada tempat di luar kerabat berlaku umum pada masa ini. Seperti yang telah dibahas, mereka akan ditempatkan di antara kebun kelapa yang mereka garap dan sekaligus mereka jaga.

Pada akhirnya, tanpa bermaksud memaksakan untuk sejalan dengan pandangan umum sebagian ahli, kami sepaham dengan salah satu pandangan yang dijabarkan dalam tesis Heddy bahwa gejala patron-klien yang muncul dalam komunitas Bugis di Pontianak merupakan ide atau pandangan hidup masyarakat Bugis yang diterapkan di Pontianak untuk dapat bertahan hidup di daerah baru. Pandangan ini sebagaimana yang disampaikan Heddy mendasarkan pada perspektif komunitas Bugis perantau selaku klien (Heddy, 1988: 23).

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



IV
AKTIVITAS EKONOMI KOMUNITAS BUGIS
DI KESULTANAN PONTIANAK
PADA AWAL ABAD KE-20
HINGGA BERAKHIRNYA MASA KOLONIAL
Any Rahmayani

Bagian ini merupakan kelanjutan dari aktivitas ekonomi orang Bugis yang telah membentuk koloni-koloni Bugis di bagian-bagian wilayah Kesultanan Pontianak seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Pada periode ini kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang Bugis terutama di bidang pertanian dan perkebunan sangat terkait dengan respon pasar Singapura terhadap beberapa produk dari tanaman niaga.²⁴ Setelah mereka memulai menanam kelapa pada pertengahan abad ke-19, maka potensi kelapa dan kopra sebagai produk olahannya semakin melejit di awal abad ke-20. Semakin berkembangnya Singapura terutama pada tahun 1890 merupakan salah satu faktor berkembangnya perdagangan tanaman niaga di berbagai wilayah Hindia Belanda

²⁴ Dapat dikatakan bahwa sampai akhir abad ke-19, perdagangan masih merupakan aktivitas terpenting para migran Bugis pada umumnya. Pengenalan kapal uap dan pembukaan Terusan Suez meningkatkan permintaan Eropa terhadap produk pertanian tropis sehingga mendorong dibukanya lahan baru bagi tanaman niaga baru.

termasuk Pontianak. Pada bab ini akan kita melihat hubungan orang Bugis dengan orang Cina sebagai sesama penggiat ekonomi di Pontianak. Jika kita mencermati bab sebelumnya terlihat bahwa mulai ada kecenderungan bahwa orang Bugis lebih memilih untuk berkecimpung dalam produksi kelapa di perkebunan (selain juga menanam buah-buahan musiman yang juga laku di pasaran). Sedangkan peluang membuat produk olahan dari kelapa yaitu kopra ditangkap oleh orang-orang Cina yang sebagian besar berhubungan dengan eksportir Cina yang ada di Pelabuhan Pontianak. Inilah yang akan menjadi tonggak awal pembahasan pada bab ini.

1. Aktivitas Ekonomi di Permukiman Bugis Awal Abad ke-20

Seperti telah dijelaskan pada Bab terdahulu koloni Bugis di Sungai Kakap menanam kelapa sejak pertengahan abad ke-19. Lijden menyatakan bahwa perkembangan besar penanaman kelapa terjadi pada periode 10 tahun terakhir abad ke-19 dan 10 tahun di awal abad ke-20 (Sandick& Marle, 1919: 148). Sebagaimana kita ketahui bahwa koloni Bugis di pesisir Borneo merupakan *pioneer* dalam penanaman kelapa. Budidaya kelapa secara bertahap berkembang dan meluas di sepanjang pantai barat dan utara Borneo.

Sungai Kakap yang merupakan permukiman Bugis terbesar di wilayah Kesultanan Pontianak menjadi sentra perkebunan kelapa pada periode ini. Daerah-daerah yang dilalui dari Pontianak menuju ke Sungai Kakap ditandai dengan hitungan Pal. Mulai dari Pal Dua perkebunan kelapa sudah mulai nampak. Di wilayah ini banyak terdapat permukiman-permukiman orang-orang Bugis (Yeri, 2013: 253). Sungai Kakap dicatat sebagai permukiman Bugis yang didalamnya terdapat orang Cina dan Melayu dengan hasil kelapa

yang nelimpah dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang terjamin (*Kolonial Verslag tahun 1911*).

Perluasan lahan kelapa pada periode ini juga terlihat pada lajur lahan di bagian utara, yang menjadi batas antara Kakap dan ibukota Pontianak, yang sebagian besar menjadi perkebunan kelapa (Sandick and Marle, 1919:148). Wilayah ini adalah wilayah Sungai Jawi. Sedang di bagian utara Sungai Kapuas, mereka mulai membuka kebun-kebun kelapa di Batu Layang sepanjang 5 km (Sandick and Marle, 1919:148). Dan tanpa menunggu waktu yang lama orang Bugis telah mampu memperluas kebunnya ke bagian selatan seperti Telok Pakedai, Selat Remis, Tanjung Bunga dan Muara Sungai Ambawang bahkan sampai Padang Tikar (Sandick and Marle, 1919: 149).

Di sisi lain, pada periode yang sama komunitas Cina yang berada di pedalaman mulai berdatangan menuju pesisir sebagai akibat dari dihapuskannya kongsi pertambangan emas milik orang-orang Cina oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.²⁵ Akibatnya, orang-orang Cina ini (baik yang tadinya berprofesi sebagai penambang ataupun petani/pekebun) banyak yang mulai mengusahakan lahan pertanian dan perkebunan. Mereka mengusahakan pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang, ketela dan buah-buahan. Dan segera setelah permintaan Singapura atas tanaman produksi seperti karet dan kelapa meningkat, lahan tanaman pangan tersebut tergantikan oleh karet, kelapa, lada, sagu, dan pinang (Vleming, 1926: 257). Dengan cepat mereka mengadopsi ketrampilan orang Bugis dalam mengelola kebun kelapa.

²⁵ Perang Kongsi yang hebat pada pertengahan abad ke-19 memiliki dampak yang luar biasa bagi pemukim Cina di pusat-pusat kongsi.

Keadaan yang sama terjadi juga di Pontianak. Orang-orang Cina mulai berkecimpung di perkebunan kelapa saat harganya melonjak naik. Selain ikut menanam, mereka lihai dalam usaha pengolahan kopra. Pada tahun 1925 nilai ekspor kopra dari Borneo Barat meningkat tiga kali lipat dari nilai ekspor tahun 1919 (Vleming, 1926: 257).

Kedatangan Migran Bugis di awal abad ke-20

Potensi kelapa yang dimiliki oleh Sungai Kakap dilihat dengan jeli oleh pemerintah kolonial. Mereka kemudian mendukung dengan pembangunan infrastruktur yang cukup memadai termasuk pembangunan jalan darat menuju pusat kota Pontianak yang merupakan urat nadi perdagangan Borneo Barat. Jalan ini sebenarnya telah dirintis pada akhir abad ke-19 (lihat Bab 3) namun belum menunjukkan jalan yang memadai. Walaupun prasarana sungai merupakan jalur utama lalu lintas kelapa di wilayah ini namun pemerintah pada saat itu telah memikirkan pembangunan jalan darat sebagaimana juga beberapa jalan yang telah dirintisnya di sepanjang pesisir barat dari Pontianak hingga Sambas. Jalan sepanjang 19 km dari Pontianak menuju Sungai Kakap telah dibangun walaupun di bagian jalan mendekati Sungai Kakap terutama mulai dari Pal 3 masih membutuhkan struktur jalan yang kokoh. Wilayah ini penuh dengan jalan tanah sangat lembut dan akan berlumpur jika hujan tiba. Demikian juga bagian jalan menuju Pontianak terjadi penurunan bagian jalan sehingga harus ditambahkan sabut kelapa untuk dapat dilalui (Enthoven dan Sandick dan Marle, 1919: 82). Pada tahun 1919 jalan tersebut mulai diperhalus dengan menggunakan kerikil halus sehingga mempermudah lalu lintas. Pentingnya wilayah ini sebagai produsen kelapa terbesar di wilayah Pontianak menambah kepentingan pemerintah untuk membangun rute-rute

jalan yang menghubungkan kantong-kantong perkebunan kelapa sebagaimana rute Sungai Kakap-Kalimas-Punggur-Telok Pakedai (*Memorie van Overgave* J H Meyer 1927).

Selain mengolah perkebunan kelapa sebagai aktivitas ekonomi utama orang Bugis di Pontianak, orang-orang Bugis terkenal pandai mengolah lahan persawahan padi dan buah-buahan. Setidaknya suplai beras di ibukota Pontianak tergantung pada produksi pada di Tanjung Saleh, lahan sepanjang Pontianak dan Sungai Kakap, Siantan, Sungai Ambawang dan sepanjang Sungai Kapuas Kecil dan Teluk Kumpai yang dikelola Bugis. Persawahan padi menjadi lahan kedua yang dikelola orang Bugis selain kebun kelapa. Lokasi terbesar persawahan padi adalah pesisir pantai dan wilayah Kubu (*MvO* O. Horst 1934). Orang Bugis juga terkenal rajin membudidayakan tanaman yang laku di pasaran seperti buah-buahan. Enthoven mencatat banyak kebun-kebun nenas yang diusahakan orang Bugis di Sungai Kakap yang laku di pasar Singapura.

Perluasan aktivitas ekonomi orang Bugis di Sungai Kakap tidak terlepas dari *booming* karet di awal abad ke-20. Di sepanjang jalan dari Pontianak menuju Kakap antara KM 1 dan 5 didapati juga kebun karet (Rahmayani, dkk, 2014: 90). Kebun ini bukan saja dimiliki oleh orang Bugis namun banyak diantaranya orang-orang Cina yang mengusahakannya (wawancara dengan Aidzin H Sulaiman). Pendetang Bugis yang datang ke Pontianak jumlahnya pun makin bertambah Mereka mengerjakan perkebunan karet. Orang-orang Bugis yang tinggal di daerah di sekitar Pontianak kemudian mengajak keluarganya dan setelah 5 tahun mereka memiliki kebun kelapa dan tinggal di sekitarnya (*Kolonial Verslag* tahun 1928; *Memori van Overgave Borneo West* tahun 1927).

Pada awal abad ke-20 seiring dengan berkembangnya perdagangan kopra, pemerintah kolonial mengembangkan beberapa

wilayah Borneo Barat, di samping Pontianak tentu saja, menjadi pusat perdagangan dan hiburan termasuk salah satunya adalah Kuala Kakap yang didominasi oleh pemukim Bugis (Sandick and Marle, 1919: 10).²⁶

Aktivitas Ekonomi Migran Bugis di Awal Abad ke-20

Keuntungan yang besar dari karet pada tahun 1925 menarik migran Bugis untuk datang ke Borneo Barat demi mengerjakan lahan-lahan tanaman niaga tersebut (*MvO JH Meyer 1927*).²⁷ Perkebunan karet tersebar sampai pelosok Borneo Barat. Fakta yang paling signifikan mendukung terjadinya migrasi Bugis ke daerah lain dalam dekade pertama abad ke-20 adalah geliat perdagangan padi, karet, kelapa. Sebagian besar migrasi Bugis ke Borneo dan Semenanjung Malaya terlibat dalam penanaman karet dan kelapa. Tanaman perkebunan ini cocok dan hampir sama dengan produksi pertanian di Sulawesi Selatan sebagai daerah asal mereka. Migrasi Bugis di Borneo Barat tersebar di berbagai wilayah seperti Pontianak, Mempawah, Pemangkat dan berpecah di daerah lain yang ada di Borneo Barat. Pontianak terutama pesisir Kakap yang didominasi oleh masyarakat Bugis yang memiliki potensi untuk mengembangkan perkebunan kelapa. Hal ini sangat dimungkinkan karena struktur tanah sangat sesuai dengan jenis tanaman kelapa yang membutuhkan air.

²⁶ Wilayah lainnya adalah Jungkat, Peniti Besar, Sungai Pinyuh, Mempawa, Sungai Duri, Sungai Raja, Teluk Suak, Singkawang, Selakau, Pemangkat, Sambas, Bengkayang, Ledo dan Sebalau.

²⁷ Tidak saja orang Bugis yang datang untuk bekerja di lahan karet namun juga orang-orang dari daratan Cina (yang meninggalkan daerah asalnya yang dilanda situasi politik yang tidak menentu) yang tertarik pada kabar-kabar baik tentang karet.

Proses migrasi gelombang ketiga ini menunjukkan bahwa sistem patron klien masih bertahan walaupun sistem perekrutan mulai menunjukkan beberapa hal berbeda yang dari sebelumnya. Sebuah catatan kecil tentang migrasi Bugis dari Pontianak ke Johor di sekitar 1885-1920 menunjukkan bahwa pada kurun waktu tersebut migran Bugis di wilayah Kesultanan Pontianak sebenarnya telah memiliki pengalaman dan ketrampilan yang memadai dalam pengerjaan kebun kelapa dan pengolahan kopra. Pembukaan Terusan Suez yang memicu permintaan Eropa terhadap produk-produk tanaman tropis ditanggapi positif oleh orang-orang Bugis. Menangkap kesempatan tersebut, sekelompok orang-orang Bugis yang berasal dari Pontianak mencoba peruntungan dengan menjadi buruh kontrak di sebuah perkebunan milik keluarga Arab di Johor. Di sini mereka menerapkan pengalaman dalam pengolahan kebun kelapa dan perdagangan kopra. Mereka sangat memahami bahwa pemeliharaan kebun kelapa lebih mudah dari kebun karet. Mereka mengetahui bahwa lahan di Johor tersebut lebih baik daripada lahan yang mereka tinggalkan di Pontianak (Ammarell, 2002: 58). Orang-orang Bugis dari Pontianak ini, sebagian besar adalah Bugis dari Wajo, berlayar menggunakan kapal-kapal Bugis dengan dipimpin oleh seorang patron yang juga memberikan modal pertama (seperti benih dan peralatan) dan memberikan pinjaman dengan bunga yang murah bagi pengikutnya yang hendak membuka lahan baru. Mula-mula, mereka mengerahkan buruh dari keluarga miskin dan budak untuk menanam tanaman subsisten yang kemudian ditinggalkan untuk menanam tanaman kelapa (Ammarell, 2002: 58).²⁸ Ini menunjukkan bahwa pola patron klien masih diterapkan pada awal abad ke-20 setidaknya sampai tahun 1930-an.

²⁸ Kelompok ini meninggalkan Johor menuju Sumatra untuk menanam padi, segera setelah Perang Dunia Pertama ketika harga kelapa turun dan harga padi meningkat.

Orang-orang Bugis yang tinggal di daerah di sekitar Pontianak mengajak sanak famili mereka di Sulawesi untuk datang dan setelah 5 tahun biasanya mereka telah memiliki kebun kelapa dan tinggal di sekitarnya. Gelombang kedatangan mereka terlihat dari jumlah penumpang KPM yang bersandar di Pontianak. Pada tahun 1926 KPM membawa 1900 orang Bugis ke daerah ini (MvO J H Meyer 1927). Dari sisi proses kedatangan ini kita dapat melihat bahwa orang-orang Bugis tidak selalu lagi menggunakan kapal-kapal mereka sendiri dalam pengangkutan migran. Walaupun beberapa saudagar Bugis masih mendatangkan tenaga kerja dengan kapal mereka yang bersandar di Pelabuhan Seng Hie²⁹ nampaknya penggunaan KPM berhubungan dengan mulai dibukanya rute KPM dari dan menuju Pontianak.

Migrasi orang-orang Bugis ke Borneo Barat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya (*Kolonial Verslag* 1928). Migrasi orang Bugis pada periode ini merupakan bagian dari migrasi berbagai etnis ke Borneo barat yang disebabkan oleh keuntungan yang di dapat dari perkebunan. Bahkan banyak pemilik kebun Bugis sengaja mendatangkan orang Madura untuk bekerja di perkebunan karet tersebut.³⁰ Perkebunan karet yang dikelola orang-orang Bugis juga menarik orang-orang Madura, yang datang menggunakan perahu dari tempat asal mereka, untuk mengerjakan kebun karet (MvO H. H. Meyer tahun 1927).

²⁹ Wawancara dengan Aidzin H Sulaiman yang merupakan keturunan dari seorang saudagar Bugis di awal abad ke-20.

³⁰ Wawancara dengan Aidin H Sulaiman di Pontianak tanggal 21 Maret 2016 dan Hj Zainab di Kampung Bugis tanggal 24 Maret 2016.

Sistem patronase yang berlaku pada pada abad ke-19 (lihat Bab sebelumnya) masih berlaku pada awal abad ini. Perkebunan karet dikerjakan oleh buruh-buruh yang dikontrak selama 3 tahun. Sistem kontrak ini tidak hanya berlaku untuk buruh Bugis namun berlaku pula untuk buruh-buruh Melayu, Dayak dan Madura (MGS no. 4991 tahun 1912).³¹ Nampaknya pada periode ini perekrutan tenaga kerja Bugis kali ini tidak saja dengan sistem patronase namun juga menggunakan sistem kontrak yang murni dikelola oleh perkebunan.

2. Hubungan Ekonomi antara Pekebun Bugis, dan Pedagang Cina serta Kantor Dagang Barat

Awal abad ke-20 dapat dikatakan sebagai periode dimana para pekebun Bugis menikmati hasil kerja kerasnya. Pada kurun waktu ini banyak saudagar Bugis yang menguasai berbagai usaha dan juga luasan lahan yang besar. Memori tentang kesuksesan para orang kaya Bugis kala itu terekam dalam berbagai jejak. Seorang saudagar kelapa, H.A. Patah, menurunkan ribuan kelapa dalam satu kali panen (Sinar Borneo no 1 tahun 1 tahun 1936). Sebagaimana petikan wawancara di bawah ini:

“...Sungai Itik Laut, Sungai Itik Darat, Sungai Berembang dan Jeruju itu kebanyakan milik keluarga Haji Badrun Haji Patah...Ambok Pasir menguasai daerah Wajo di perbatasan Pontianak dan Mempawah... ada lagi orang kaya di sana Haji Thaha itu menguasai Pasar Kapuas... Haji Adam yang kaya itu ada di Tanjung Hulu...”³²

³¹ Hal ini tidak hanya berlaku di wilayah pesisir saja. Laporan J. van Exter mengatakan bahwa perkebunan karet yang terletak di daerah Sanggau di pedalaman dengan luas 700 are diolah oleh pekerja Bugis, Melayu, Dayak dan Madura.

³² Wawancara dengan Aidzin H Sulaiman.

Dari hasil wawancara terlihat bahwa terdapat dua lokasi permukiman orang-orang kaya Bugis yang menguasai perdagangan dan perkebunan yaitu (1) Kampung Dalam Bugis yang berada di dekat istana dan (2) Sungai Kakap di pusat budidaya kelapa.

Orang-orang Madura, Dayak, Melayu, Banjar, Bugis, Cina dan Eropa mempunyai hubungan yang harmonis di daerah ini dan mereka kebanyakan adalah petani dan mempunyai tanah untuk ditanami. Pada masa *booming* karet juga disebutkan bahwa antara orang Dayak, Melayu, Banjar, Bugis dan Madura juga Cina dan penduduk Eropa memiliki hubungan yang harmonis dalam pembangunan (MvO H. H. Meyer tahun 1927).

Para Saudagar Bugis

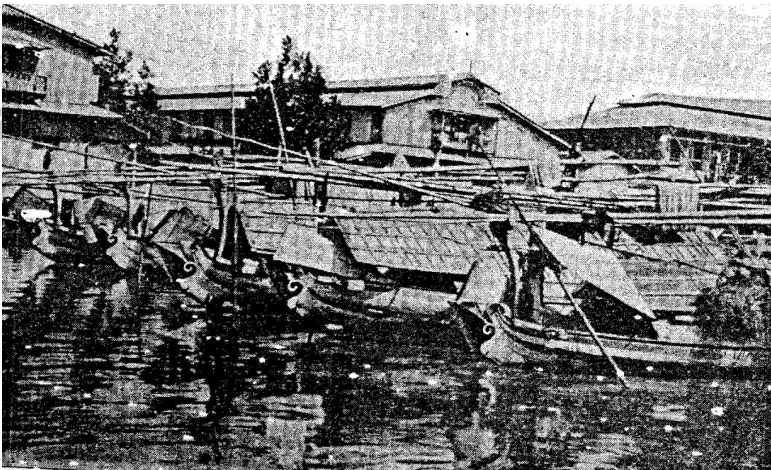
Di satu sisi para petani Bugis kaya yang memiliki kebun yang luas kadang meningkatkan diri menjadi saudagar dan melakukan kegiatan ekonomi lain selain menunggu hasil kebun. Beberapa Haji (sebutan untuk para saudagar Bugis) bersama dengan saudagar Arab ataupun Melayu, sering menjadi pedagang perantara. Mereka sering membeli produk hutan dan perkebunan seperti kelapa dan kopra, walaupun jumlahnya tidak sebanding dengan orang Cina yang melakukan kegiatan yang sama (Vleming Jr., 1926: 260).

Mereka juga melakukan praktek perkreditan dalam perdagangan kopra. Orang-orang Bugis di Pontianak sebenarnya tidak asing dengan praktek ini karena para pendahulunya telah mengenal praktek perkreditan (Lihat Bab III). Tempat penjualan kopra dari produsen dengan pembeli baik pedagangnya sendiri, atau bawahan/pedagang perantara dari pedagang besar tersebar di sepanjang pesisir Pontianak, Singkawang dan Pemangkat. Para pedagang besar Bugis, bersama orang Cina dan Melayu sering melakukan pembayaran

ataupun kontrak perdagangan dengan hak membeli kebun mereka kembali. Uang yang dipinjamkan dengan jaminan hasil kebun mereka untuk pembeli. Mereka menyerahkan hasil dengan harga yang telah disepakati ataupun dengan harga pasar yang dikurangi prosentase tertentu. Kesalahan yang sering terjadi adalah gagal bayar. Hal ini merupakan pengaruh dari penetapan bunga yang minimal 20% pertahun. Akibatnya, kebun mereka akan diambilalih oleh pemberi pinjaman. C. de Wit pejabat Badan Perkreditan Hindia Belanda menyatakan bahwa sulit bagi rakyat untuk mendapatkan modal kerja. Pemberi pinjaman baik Cina maupun pribumi (termasuk Bugis) mensyaratkan bunga 20% per bulan untuk para pengrajin, tukang-tukang dan pemilik kebun kecil sedangkan untuk pedagang ikan malah dipatok 20%-25% per hari. Pemberi pinjaman Eropa mematok bunga lebih rendah sebesar 12%-12,5% per bulan. Dilihat dari besarnya bunga pinjaman tersebut nampaknya wajar jika pada periode ini banyak kebun yang berpindahtangan dari pekebun kecil ke tangan kapitalis (Sandick dan Marle, 1919: 219). Kenyataan ini juga diperjelas oleh catatan kolonial yang menyatakan bahwa koloni-koloni Bugis di sekitar Sungai Kakap tampak hubungan yang intens antara orang Bugis dan orang Tionghoa. Tidak saja pada aktivitas bisnis namun juga pada aktivitas keuangan mereka (MGS no. 4991 tahun 1912).

Namun di sisi lain Pemerintah berusaha membantu penduduk agar tidak terbelit hutang dengan mendirikan Bank Rakyat pada tahun 1917 di daerah Pontianak. Adanya bank tersebut sangat membantu orang-orang Bugis yang tinggal di daerah Kubu yang mata pencahariannya sebagai petani. Uang yang dipinjam oleh orang-orang Bugis harus dikembalikan dengan bunga yang rendah dan pemerintah mengharuskan mereka menggarap tanah yang dimilikinya dengan menanam hasil bumi (*Koolonial Verslag* 1928).

Dalam beberapa laporan pejabat kolonial dikatakan bahwa secara umum transaksi perdagangan di pedalaman dikendalikan oleh orang-orang Cina. Metode yang paling umum mereka gunakan dalam hal ini adalah barter antara produk ekspor dan produk impor dengan tambahan sedikit uang. Metode lain adalah sistem kredit di awal yang akhirnya memaksa produsen untuk terus memproduksi untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan. Dampak dari sistem kredit ini akan lebih buruk apabila produsen berada jauh dari pelabuhan sehingga memerlukan biaya pengangkutan yang tidak murah. Sehingga, hanya produsen yang berada dekat dengan pelabuhan khususnya Pelabuhan Pontianak, yang dapat terhindar dari praktek kredit ini (Vleming Jr., 1926: 258). Praktek-praktek yang mereka jalankan sering mendapatkan respon negatif dimana dikatakan bahwa orang Cina tidak pernah absen dalam memperluas kebun milik mereka dengan membuat reklamasi-reklamasi baru, pengambilalihan lahan-lahan milik orang Melayu, yang terjebak dalam sistem kredit yang dijalkannya (Sandick dan Marle, 1919: 149)



Gambar
Perahu dagang di sepanjang sungai di Pontianak
(Sumber: Sandick dan Marle, 1919: 84)

Para Haji juga memiliki pengaruh penting dalam perdagangan karet. Bahkan sebagian besar peredaran uang diinvestasikan bukan oleh penyadap karet namun oleh para pedagang perantara yang tidak lain adalah para Haji dan orang-orang Cina. Mereka berinvestasi dalam pendirian perusahaan dan pabrik-pabrik baru baik karet maupun kelapa (Vleming, 1926: 260). Para saudagar Bugis yang sebelumnya berkonsentrasi pada perkebunan kelapa mulai menangkap peluang pada budidaya karet. Oleh karenanya mereka memutar keuntungan dari budidaya kelapa menuju budidaya karet. Mereka membeli tanah-tanah di utara Sungai Kapuas untuk ditanami karet. Tenaga kerja didatangkan dari jaringan mereka yang ada di Sulawesi. Pada kurun waktu ini, tenaga kerja bukan saja orang Bugis namun juga didatangkan orang-orang Madura bahkan Cina (wawancara dengan Aidzin H Sulaiman pada tanggal 21 Maret 2016).

Pada tahun 1918 para pengusaha membuka kebun karet di beberapa wilayah seperti (1) kebun karet di wilayah Pontianak menuju Kuala Mandor sepanjang 18 km sebelah utara Landak. Di sepanjang sebelah selatannya juga dibuka kebun karet tetapi hanya setengahnya yang ditanami (2) Mulai dari sebelah belakang kediaman sultan hingga Telok Kumpai, sepanjang 18 km. Ada parit yang dibuat melalui kebun karet ini sepanjang Sungai Ambawang. Di sisi kedua sungai ini parit dikeruk dengan lebar 3 km dan dalamnya 200 depa (3) Sepanjang muara Kapuas kecil mulai dari Pontianak hingga Sei Seribu yang panjangnya 6 km (4) Sei Andong dan karet juga ada di semua daerah di Sukalanting (Rahmayani, 2014: 69). Wilayah di sekitar kediaman Sultan menuju Sungai Ambawang serta Teluk Kumpai merupakan wilayah lahan yang paling banyak dibeli oleh saudagar kelapa Bugis untuk dikelola menjadi lahan karet.

Pengolahan lahan ini dibantu oleh orang Madura, pendatang Bugis dan orang Cina yang sengaja mereka datangkan³³

Terlepas dari pihak mana yang diuntungkan dalam perdagangan ini, fenomena ini menunjukkan kemajuan ekonomi pribumi yang cukup berarti di awal abad ke-20.

Parit sebagai Investasi Modal

Investasi modal tidak hanya berhenti di bidang tersebut di atas saja. Keberadaan parit dan perluasan jalan di perkebunan merupakan bentuk modal yang ditanamkan sepenuhnya oleh pengusaha pribumi maupun Cina (Vleming, 1926: 260). Penggalan parit memiliki bagi lahan memiliki dua manfaat yaitu menghindarkan banjir di perkebunan karena air pasang serta membuat tanah di sekitar parit menjadi lebih tinggi karena ditimbun dengan tanah dari galian parit tersebut. Penggalan parit-parit tersebut membagi tanah datar menjadi beberapa petak. Panjang parit dapat mencapai 20 km (Rahmayani, 2014: 122)

Sedangkan bagi produk, keberadaan parit sangat diperlukan dalam pendistribusian kelapa. Kelapa-kelapa yang telah dipanen diikatkan ke tali menyusuri parit hingga sampai ke tangan pembeli.

Sebuah laporan seorang konsultan perkebunan pada *Department van Landbouw, Nijverheid en Handel* (Kementerian Perkebunan, Industri dan Perdagangan) menyebutkan baik orang Cina, Bugis dan Melayu begitu meyakini bahwa perlunya saluran air baik kanal utama (*verkeerparits/* kanal untuk lalu lintas) dan kanal sekunder (parit kongsi) perlu dibangun oleh pemerintah (Vleming, 1926: 257-258). Sedemikian besarnya kepentingan bersama antara Cina,

³³ Wawancara dengan beberapa informan yang merupakan keturunan saudagar Bugis.

Bugis dan Melayu di pesisir Pontianak³⁴ terhadap perkebunan kelapa membuat mereka bahu membahu dalam membangun parit yang akhirnya dilebarkan guna menjadi prasarana transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah ini, kebun-kebun besar seperti kebun kelapa dan karet sangat bergantung pada air sebagai bagian penting dari aspek transportasi (MvO J.H. Meyer 1927). Dalam budidaya kelapa, dikenal spesifikasi pekerjaan berdasarkan etnis. Orang Cina dikatakan sangat ahli dalam membuat saluran air atau parit, sedangkan orang Bugis dan Melayu juga Madura lebih fokus pada pengerjaan kebunnya (Rahmayani, 2014: 122)

Bugis dan Cina dalam Pengolahan Kopra dan Minyak Kelapa

Berbicara tentang orang-orang Cina dalam aktivitas ekonomi di Pontianak khususnya dan Borneo Barat pada umumnya, mereka dicatat sebagai aktor ekonomi terdepan pada periode ini. Walaupun terdapat beberapa perusahaan dagang Eropa di Pontianak namun orang Cina tetap menempati urutan pertama dalam aktivitas ekonomi terutama ekspor impor di Borneo barat. Kemunduran kongsi pertambangan emas, penipuan-penipuan yang dilakukan pemberi pinjaman, prasarana jalan yang tidak begitu baik merupakan beberapa sebab bagi pemilik modal Eropa untuk menjauhkan diri dari Borneo Barat (Vleming, 1926: 255). Sebagai contoh, perusahaan kapal milik Kerajaan Belanda, *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM), menemui kesulitan dalam menjalankan usahanya di pelabuhan-pelabuhan Borneo Barat, terkait dengan keberadaan orang-orang Cina ini. Keterikatan dan kerjasama ekonomi antara

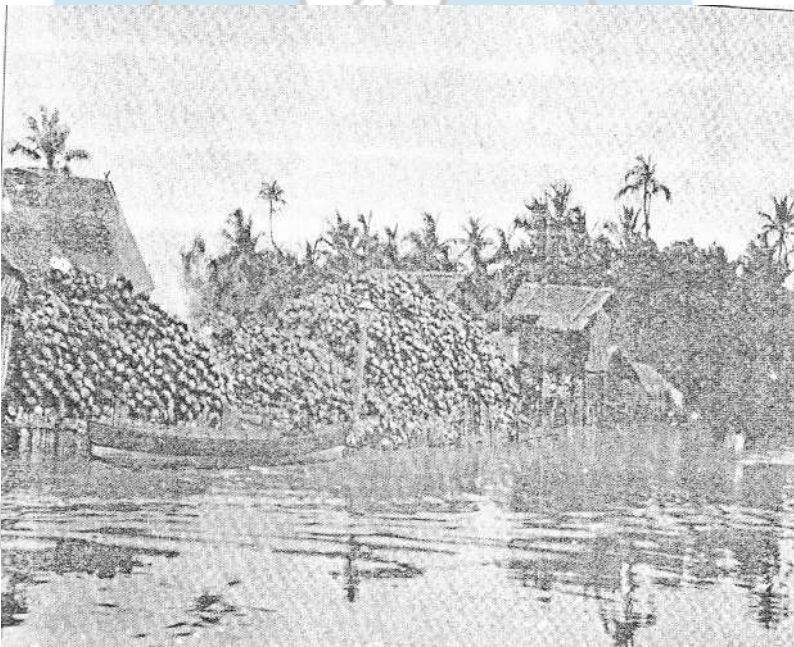
³⁴ Demikian juga dengan mereka yang tinggal di pesisir Kubu dan Telok Melano.

orang Cina di Borneo Barat dengan orang Cina di Singapura yang telah berlangsung lama telah membentuk sebuah jaringan ekonomi yang kuat. Untuk memutus atau paling tidak mengurangi rantai ekonomi antara Borneo Barat dan Singapura, KPM mengaktifkan jalur Pontianak-Batavia yang diharapkan dapat memasok kopra untuk OFI Cikarang. Namun pedagang Cina di Pontianak merasa keberatan karena tidak memiliki jaringan perdagangan di Jawa. Selain itu barang-barang impor dari Singapura lebih mudah dan murah jika didapat dari rekanan mereka di Singapura. Rute Pontianak-Singapura yang ditawarkanpun kurang menarik minat karena bersaing dengan kapal-kapal Cina yang telah ada sebelumnya (Asba, 2007: 54). Dan perlu diketahui bahwa firma-firma Eropa yang sempat ada di periode ini rupanya juga tidak terlepas dari peran orang Cina. Barang-barang ekspor yang diproduksi dari pedalaman mereka dapatkan dari perantara-perantara Cina.

Hubungan ekonomi yang harmonis antara para pekebun kelapa Bugis dan orang-orang Cina terlihat dari aktivitas pengolahan kopra sebagai produk unggulan Borneo Barat pada saat itu dan pembuatan minyak kelapa. Kopra di Sungai Kakap juga dibuat oleh orang-orang Cina yang juga merupakan pedagang-pedagang kecil. Kebanyakan mereka tinggal di muara Sungai Kakap (Enthoven, 1903: 826). Pedagang perantara Cina ini memperoleh produk tersebut dengan menyiapkan uang muka dan barang-barang impor. Beberapa pemilik perkebunan kadang memproduksi kopra langsung dari hasil perkebunannya (*MvO W.Ch. Ten Cate*).³⁵ Pada masa ini pekebun-pekebun kelapa kelas menengah dan kecil biasanya menjual hasil kebun (maupun kopra jika mereka memiliki tempat pengolahan kopra sendiri) kepada pengumpul Cina. Para pengumpul ini biasanya juga berprofesi sebagai pedagang kecil yang memiliki fungsi

³⁵ Wawancara dengan beberapa informan menunjukkan keterangan yang sama bahwa mereka kadang membangun langkau di kebun maupun di sekitar rumah tinggal mereka.

sebagai pendistribusi kebutuhan sehari-hari penduduk. Penduduk membutuhkannya untuk perdagangan kecil seperti garam, tembakau, ikan asin, minyak, kain, dan lainnya (MvO West Borneo). Kadang mereka tidak hanya menjadi pengumpul kelapa saja namun mereka juga menerima hasil kebun seperti pinang yang banyak ditanam oleh orang Bugis di Sungai Kakap. Dari para pedagang kecil ini produk dijual kepada pedagang perantara untuk sampai kepada eksportir atau pabrik pengolahan minyak.



Gambar
Tempat penjualan kelapa di Djerojoe Besar
(Sumber: Sandick & Marle, 1919:154)

Yang perlu dicermati adalah kedatangan orang Madura bersama-sama dengan gelombang kedatangan orang Bugis ke Pontianak untuk mengerjakan lahan-lahan karet. Orang Madura mulai mengerjakan

lahan-lahan karet milik saudagar Bugis di daerah Sungai Ambawang mulai awal abad ke-20.

Perkebunan milik perusahaan swasta di sekitar permukiman Bugis

Pada saat yang sama modal swasta merambah dinamika ekonomi di Pontianak. Setidaknya ada dua perkebunan kelapa milik Eropa yaitu Pematang Limau dan Pematang Tujuh, di landschap Pontianak di muara Punggur Besar (Sandick& Marle, 1919: 152). Pematang Limau (*lbc.*³⁶) terletak di delta sebuah muara Sungai Punggur Besar dengan ondernemer-administrateur T.H. Neve (didirikan pada 1911, tahun 1915 diambilalih oleh P.G Luppès). Sedangkan Pematang Tujuh (*lbc*) berada di dengan muara Punggur Besar, seluas 3945 bau dengan ondernemer administrateur Th. A. de Neve (berdiri pada 1910, 1915 diambilalih oleh *Pontianak Handel en Cultuur Maatschappij*) menanam kelapa, karet hevea, dan sawit (Sandick& Marle, 1919: 171-172).

Dalam budidaya karet orang-orang Bugis bersaing dengan perkebunan Eropa yang ada di Pontianak. Berikut beberapa perkebunan karet milik swasta yang ada di Pontianak

1. Pematang Toedjoeh
2. Telok Koempai, Kapuas Kecil, sebesar 1967 bau dengan pemiliknya Tjio Tjeng Siang, didirikan pada tahun 1911 dan dijual kepada A.P. van Geelkerken yang kemudian ditanami hevea
3. Sungai Poetat, di seberang Pontianak, dimiliki oleh perkebunan Spencer dengan nama perkebunan *N.V.Pontianak Rubber Mij.* Perkebunan ini didirikan pada tahun 1909 dan ditanami hevea

³⁶ *Landbouw concessie* merupakan istilah bagi lahan perkebunan yang diperoleh melalui konsesi

4. Soengei Sahang II, terletak di sebelah barat Soengei Poetat, pemiliknya Lim Foek Tjong. Kebun ini didirikan pada tahun 1907, di pindahtanggankan pada tahun 1915 kepada *N.V. Handel Mij* di Pontianak
5. Dua perkebunan kecil milik orang Jepang yang terletak pada sungai Mandor pada tahun 1917 dan 1918 didirikan, yang terdiri dari (1) Moenggoe Goeba sebesar 117 bau (2) Memperingang III sebesar 123 bau. Pada tahun 1916 di daerah Soengei Poelau I yang terletak pada muara Punggur Besar terdapat perkebunan karet sebesar 201 bau dengan pemiliknya Tjan A Khoei (*Verslag eener Spoorwegverkenning in Noordwest-Borneo*, 1919; 171-172 dalam Rahmayani, 2014: 77).

Uraian di atas menunjukkan bahwa selain hubungan patron klien sebagai ide ataupun pandangan hidup orang-orang Bugis untuk bertahan di lingkungan baru sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu, kemampuan mereka untuk memasukkan diri dalam sistem ekonomi lokal menjadi bentuk strategi lain dalam diaspora mereka di Pontianak sebagaimana yang dinyatakan Ammarel sebagai bentuk reputasi pendatang dan pemukim Bugis di beberapa wilayah di Indonesia. Menurutnya, reputasi orang Bugis bahkan dapat sampai pada fase mendominasi ekonomi lokal dan tatanan sosial setempat.

Kalimantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

V PENUTUP



Simpulan

Kedatangan orang Bugis di Kesultanan Pontianak tidak terlepas dari jaringan politik dan ekonomi para bangsawan Bugis dengan penguasa kerajaan di pesisir barat Borneo lainnya terutama Kerajaan Sukadana dan Kesultanan Sambas. Orang Bugis mewarnai perpindahan kekuatan ekonomi di pantai Barat, dari Kerajaan Sukadana beralih ke Kerajaan Pontianak. Pada masa Syarif Abdul Rahman pedagang Bugis disebut sebagai penghutang terbesar baginya. Kebutuhan akan kehadiran pedagang tersebut dibutuhkan sehingga hutang-hutang tersebut tidak dipersoalkan. Ketenteraman aktivitas dagang para pedagang Bugis di Pontianak juga dijaga oleh Syarif Abdul Rahman. Kepala-kepala kampung Bugis dipilih oleh mereka sendiri namun Sultan merupakan orang yang menetapkannya. Para kepala kampungpun sering beraudiensi dengan Sultan terkait dengan kepentingan-kepentingannya. Adapun kondisi tanah di Pontianak pada umumnya sama. Kondisi tanah cukup labil karena merupakan

tanah sedimentasi yang menghutan. Permukaan tanahnya yang merupakan bekas endapan hutan biasa disebut dengan tanah gambut atau *sepoh/ sepok*. Tanah gambut berada di atas tanah liat (yang biasanya merupakan tanah liat kuning). Kondisi tanah semacam ini cocok untuk bertanam padi, jagung kelapa, karet dan tebu.

Keberadaan migran Bugis di Pontianak pada paruh kedua abad ke-19 tidak dapat dipungkiri terkait dengan usaha perkebunan kelapa yang dirintis oleh pihak Kesultanan Pontianak dan diikuti oleh elite keturunan Arab dan Melayu. Adapun kedatangan mereka pada masa ini didominasi oleh praktik yang disebut *pandelingschap* oleh pemerintah kolonial merupakan hasil kerja sama ekonomi para pemilik modal tersebut di atas dengan orang-orang terkemuka di Sulawesi Selatan yang memiliki “pengikut”. Kedatangan hingga kelanggengan hidup migran Bugis di Pontianak pun tidak dapat dilepaskan dari hubungan patron-klien masyarakat Sulawesi Selatan yang mewadahi aktivitas sosial-ekonomi mereka. Dalam menjalankan aktivitas baik sosial maupun ekonomi, migran Bugis berdampingan dengan kelompok masyarakat lain terutama Melayu dan Cina. Dengan masyarakat Melayu selain hubungan yang bersifat ekonomi mereka juga menjalin perkawinan. Ikatan perkawinan berpengaruh tidak saja pada percampuran budaya tetapi juga secara politis terutama pada status ke-abdi-an (kekawulaan/ *onderdanship*) mereka dalam otoritas pemerintahan Kesultanan Pontianak dan bukan dikategorikan sebagai pendatang atau orang asing yang seringkali dijadikan kawula pemerintah kolonial. Secara hukum, ikatan dengan sultan ini kemungkinan yang membuat para migran Bugis merasa memiliki patron utama sehingga memilih bertahan hidup di Pontianak. Secara praktis, aktivitas ekonomi para migran Bugis sehingga dapat hidup dan bertahan dalam cakupan waktu yang relatif panjang selama paruh kedua abad ke-19 sebagian besar dijalankan pada bidang pertanian, khususnya perkebunan kelapa. Perkebunan kelapa juga

memberi akses pada diferensiasi kerja lain, yakni pengolahan minyak dan pertanian lain. Secara umum, sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang pejabat kolonial dalam sebuah laporan, orang Bugis dipandang telah menghidupkan sumber-sumber keuangan di Kalimantan Barat.

Aktivitas ekonomi orang Bugis di awal abad ke-20 merupakan kelanjutan dari aktivitas ekonomi yang telah dimulai komunitas Bugis di abad ke-19. Gelombang kedatangan perantau Bugis pada abad ini lebih merupakan respon terhadap permintaan produk tanaman niaga, khususnya kelapa dan karet di kemudian hari, yang secara intensif dikelola oleh sebagian besar komunitas Bugis Pontianak. Pemilik kebun Bugis merasa perlu untuk menambah tenaga kerja mereka untuk perkebunan-perkebunan yang mereka yang semakin luas sehingga mencapai hasil maksimal di perkebunan kelapa dan karet. Pola patron klien masih diterapkan dengan mendatangkan orang-orang Bugis menggunakan kapal-kapal Bugis dengan dipimpin oleh seorang patron yang juga memberikan modal pertama (seperti benih dan peralatan) dan memberikan pinjaman dengan bunga yang murah bagi pengikutnya yang hendak membuka lahan baru. Walaupun ada beberapa perubahan dalam proses kedatangan perantau ini termasuk transportasi yang digunakan. Pada periode ini mereka tidak saja datang menggunakan kapal Bugis namun juga menggunakan kapal dari KPM yang mulai beroperasi di awal abad ke-20. Begitupun dengan system kontrak kerja yang diterapkan oleh perusahaan perkebunan. Selanjutnya terlihat bahwa sebagian besar orang Bugis lebih memilih menekuni sektor perkebunan dibanding dengan sektor pengolahan produk kebun. Sektor yang disebut terakhir ditangkap oleh orang-orang Cina. Orang Cina tidak saja menguasai pengolahan kelapa atau pun karet namun sampai pada kegiatan ekspor produk tersebut. Demikian juga halnya dengan perusahaan Eropa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan Bugis-Cina-

Eropa membentuk sebuah jaringan perdagangan yang harmonis sebagai produsen-pedagang perantara-eksportir.

Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dalam perencanaan pembangunan ekonomi mempertimbangkan aspek-aspek etnografi dan bahan kajian sejarah yang cukup sebagai langkah awal. Mengingat dalam perjalanan sejarahnya, Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat umumnya terbentuk dari beberapa kelompok etnis yang masing-masing memiliki peran penting tidak saja secara politik dan budaya namun juga dalam bidang ekonomi. Informasi tentang sejarah berkembangnya ekonomi termasuk didalamnya hubungan antara migrasi,geografi dan topografi, juga hubungan dengan daerah luar dan daerah pedalaman dan penguasaan politik setempat jelas sangat diperlukan untuk merencanakan pembangunan ekonomi dengan basis budaya.

Pengampu kebijakan ekonomi setidaknya diharapkan untuk memperhatikan signifikansi budaya dalam perencanaan ekonomi. Dengan melihat warisan kultural yang diturunkan dalam mrngolah sumber daya alam yang ada kita akan mencapai perkembangan ekonomi tanpa ketergantungan dari pihak luar.

Daftar Bacaan

Arsip

ANRI. Inventaris Arsip BW No.5, *Algemeene Verslag*, 1829.

_____ No.12, *Algemeen Verslag*, 1843.

_____ No.61, *Politieke Verslag*, 1856.

_____ No. 18, *Algemeene Verslag*, 1859.

_____ No. 71, *Politieke Verslag* 1866.

_____ No. 24, *Algemeene Verslag*, 1877.

_____ No. 27, *Algemeene Verslag*, 1880.

_____ No. 33, *Algemeene Verslag*, 1886.

_____ No.37, *Algemeene Verslag*, 1890.

Adatrechtbundel XXVI. 1926.

Memorie van Overgave J H Meyer 1927

Memorie van Overgave Th H.J van Driessche 1913

Memorie van Overgave O. Horst 1934

MGS no. 4991 tahun 1912)

Staatsblad 1833 No. 8

Staatsblad 1882 No. 240

Enchiclopaedie van Nederlandsch Indie

Buku dan Artikel dalam Jurnal, Tesis dan Laporan Penelitian

Ahimsa Putra, Heddy Shri. 1988. *Minawang: Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Alkadrie, Syarif Ibrahim dan Pandil Sastrowardoyo. 1984. *Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Ammarell, Gene. "Bugis Migration and Modes of Adaptations To Local Situations." *Ethnology* Vol. 41, No. 1 (Winter, 2002), pp. 51-67.

Andaya, Leonard Y., 1995. "The Bugis-Makassar Diasporas." *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*. Vol. 68, No. 1 (268).

Anonim. 1871. "Varia: De Juistheid der Berichten van den Heer Niclou omtrent de Boegineesche Nederzetting te Pontianak Gehandhaafd," dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie* II.

Asba, Abdul Rasyid. 2007. *Kopra Makassar: Perebutan Pusat dan Daerah: kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bakti, Andi Faisal ed. 2010. *Diaspora Bugis di Alam Melayu Nusantara*. Makassar: Innawa.

Blink, H. 1919. "Economische Geographie van Borneo's Wester-Afdeeling." dalam *Tijdschrift voor Economische Geographie*.

Borneo Almanak 1935

Enthoven, J.J.K. 1903. *Bijdragen tot de Geographie van Borneo's Wester-Afdeeling*. Deel II. Leiden: Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill.

- _____. (terj.). 2013. *Sejarah dan Geografi Daerah Sungai Kapuas Kalimantan Barat*. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Francis, E.A. 1838. "Westkust van Borneo in 1832", dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*.
- Heidhues, Mary Somers. 2008. *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Nabil.
- Ismail, Muhammad Gade. 1985. Politik Perdagangan Melayu di Kesultanan Sambas Kalimantan Barat: Masa Akhir Kesultanan (1808-1818), *Tesis*. Depok: Universitas Indonesia.
- Kater, C. 1871. "Iets Over Het Pandelingschap in De Wester-afdeeling van Borneo en de Boegineesche Vestiging aan het Zuiderzeestrand te Pontianak," dalam *Tijdschrift Voor Nederlandsch Indie II*.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta; Tiara Wacana.
- Leyden.1814. "Sketch of Borneo," dalam *Verhandelingen van het Batavia Genootschap van Kunst en Wetenschappen VII*.
- Listiana, Dana. 2013. *Pasar Cina Pontianak setelah Penghapusan Sistem Pacht Pasar pada Awal Abad XX*. Draft Laporan Penelitian. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.
- Listiana, Dana. 2017. "Sistem Pacht dan Perluasan Negara Kolonial di Pontianak 1819-1909." *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Mansyur Diaspora Suku Bugis dan Terbentuknya Identitas To-Ugi' di Wilayah Tanah Bumbu Residensi Borneo Bagian Selatan dan Timur Tahun 1900-1942 <http://www.journal.fkipunlam.ac.id>
- Ota Atsushi.2010. "Pirates or Entrepreneurs?" The Migration and Trade of Sea People in Southwest Kalimantan, c. 1770-1820. Indonesia, No. 90, Trans-Regional *Indonesia* over One

Thousand Years (October 2010), pp. 67-95 <http://www.jstor.org/stable/20798233>

- Parani, Julianti L. 2015. Perantauan Orang Bugis Abad ke-18. Penerbitan Naskah Sumber Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Pelras, Christian. 2000. Patron-client ties among the Bugis and Makassarese of South Sulawesi, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 156, No. 3.
- _____. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta-Paris.
- Purwana, Bambang Hendarta Suta et al. 2004. *Sejarah Pemerintahan Kota Pontianak dari Masa ke Masa*. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak-Romeo Grafika.
- Rahmayani, Any, Ina Mirawati dan Eka Jaya P.U. 2014. *Tanaman Niaga di Borneo Barat pada Awal abad ke-20 (Studi tentang karet dan Kelapa)*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Rahmayani, Any dan Ina Mirawati. 2015. *Aktivitas Perdagangan di Pelabuhan Sambas 1833-1930*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sandick, J.C.F. van and Lt. Kolonel V.J. van Marle, *Verslag eener Spoorwegverkenning in Noordwest Borneo*, Dienst der Staats-Spoor-en Tramwegen, Mededeelingen Opname No. 13, November 1919.
- Sinar Borneo no 1 tahun 1 tahun 1936
- Thosibo, Anwar. 2002. *Historiografi Perbudakan: Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX*. Yogyakarta: Indonesiatara.
- Tribun Pontianak 25 Oktober 2013.
- Vlekke, Bernard H.M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Freedom Institute.

Veth, P.J. 1856. *Borneo's Westerafdeeling 2^{de} Deel*. Zaltbommel: Joh. Noman en Zoon.

_____. 1871. "Verslag Over de Residentie Borneo's West Kust, 1827-1829," dalam *TNI I*.

_____. 2012. *Borneo Bagian Barat*. Jilid I. Pontianak: Institut Dayakologi.

West Borneo raad en R.V.D Pontianak,"*West-Borneo Kalimantan Barat* 12 Mei 1947

Wijnen. 1871. "De Boegineesche Nederzetting in Pontianak," dalam *TNI I*.

Wellen, Kathryn Anderson. 2009. "Credit among the Early Modern To Wajoq," dalam *Credit and Debt in Indonesia, 860-1930: From Peonage to Pawnshop, from Kongsi to Cooperative*. Singapore: ISEAS-KITLV.

W.P., Moch Andri, Any Rahmayani dan Dana Listiana. 2008. *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat*. Pontianak: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak.

Zuhdi, Susanto. 2014. *Nasionalisme, Laut, dan Sejarah*. Depok: Komunitas Bambu.

Wawancara dengan Aidzin H Sulaiman pada 21 Maret 2016 di Pontianak.

Wawancara dengan Hj Zainab pada 24 Maret 2016 di Pontianak.



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**